

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI ACEH

Agustus 2025





LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Aceh

AGUSTUS
2025

Visi

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia Maju.

Misi

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Penerbit :

**Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh**

Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia

Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116

Publikasi LPP secara online dapat diperoleh di:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga buku "Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Agustus 2025" ini dapat dipublikasikan. Buku ini memaparkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbankan, sistem pembayaran dan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi baik untuk internal maupun eksternal Bank Indonesia. Secara umum, ringkasan hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Aceh periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Aceh pada triwulan II 2025 tumbuh 4,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 4,59% (yoy). Kendati demikian, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang tumbuh 4,96% (yoy), maupun nasional sebesar 5,12% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan turut didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian, LU Transportasi dan Pergudangan, dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Dari sisi permintaan, pertumbuhan turut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid dan masih tingginya kinerja ekspor.
2. Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 2,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian inflasi pada triwulan sebelumnya 1,53% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian inflasi Nasional 1,87% (yoy) namun masih terkendali pada rentang sasaran target inflasi tahun 2025 yaitu sebesar $2,5 \pm 1,0\%$ (yoy).
3. Sebagai Daerah yang masih didominasi oleh sektor primer dan sektor jasa, pelaku UMKM memiliki peran yang signifikan dalam menggerakkan pertumbuhan perekonomian Aceh. Dalam hal ini, strategi pengembangan hilirisasi produk UMKM akan meningkatkan porsi industri pengolahan, ketergantungan sektor primer dan tentunya akan memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan perekonomian Aceh.
4. Pada keseluruhan tahun 2025, perekonomian Provinsi Aceh diproyeksikan tetap kuat dengan capaian kinerja pertumbuhan yang terjaga di kisaran 4,41–4,81% (yoy).

Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Harapan kami, kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas dan informasi yang disajikan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan buku ini.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, Agustus 2025
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Agus Chusaini
Kepala Perwakilan

Daftar Isi

iii	Kata Pengantar
ii	Visi Bank Indonesia
ii	Misi Bank Indonesia
iii	Tim Penulis
iv	Daftar Isi
vi	Daftar Tabel
vii	Daftar Grafik
x	Ringkasan Eksekutif

BAB I

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1.1	Gambaran Umum	2
1.2.	Sisi Permintaan	2
1.3.	Sisi Lapangan Usaha	5
Boks 1 :	Diversifikasi Sumber Pertumbuhan Dan Ketenagakerjaan Aceh: Industri Pengolahan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Berkelanjutan	10

BAB II

Perkembangan Keuangan Daerah

2.1.	Gambaran umum	14
2.2.	Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah	14
2.3.	Belanja Pemerintah Pusat	15

BAB III

Perkembangan Inflasi Daerah

3.1.	Perkembangan Umum Inflasi	20
3.2.	Analisis Perkembangan Inflasi	20
3.3.	<i>Tracking</i> Inflasi Triwulan II 2025	24
3.4.	Inflasi Spasial	24
3.5.	Aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh	25

BAB IV

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan UMKM

4.1.	Kinerja Perbankan	28
4.2.	Intermediasi Perbankan	29
4.3.	Strategi dalam Mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM di Aceh	31

BAB V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1. Sistem Pembayaran Tunai	36
5.2. Sistem Pembayaran Non Tunai	36
5.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)	38
5.4. Penyaluran Program Sembako dan PKH	39

BAB VI

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

6.1. Ketenagakerjaan	44
6.2. Kemiskinan	45

BAB VI

Prospek Perekonomian Daerah

7.1. Prospek Makroekonomi	50
7.2. Prospek Inflasi	51
7.3. Rekomendasi Kebijakan	52



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Realisasi Belanja APBD Triwulan II 2025	14	Tabel 3.9	Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	22
Tabel 2.2	Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan II 2025	15	Tabel 3.10	Inflasi Kelompok Pendidikan	23
Tabel 2.3	Realisasi Belanja APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan II 2025	15	Tabel 3.11	Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	23
Tabel 2.4	Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan II 2025	16	Tabel 3.12	Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	23
Tabel 2.5	Data Realisasi APBD Provinsi Aceh Triwulan II 2025	16	Tabel 3.13	Andil Inflasi di Kota Banda Aceh (% ,yoy)	24
Tabel 2.6	Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan II 2025	17	Tabel 3.14	Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% ,yoy)	24
Tabel 3.1	Inflasi Kelompok Barang dan Jasa	20	Tabel 3.15	Andil Inflasi di Kota Meulaboh (% ,yoy)	24
Tabel 3.2	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	20	Tabel 3.16	Andil Inflasi di Aceh Tamiang (% ,yoy)	25
Tabel 3.3	Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	21	Tabel 3.17	Andil Inflasi di Aceh Tengah (% ,yoy)	25
Tabel 3.4	Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	21	Tabel 6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	44
Tabel 3.5	Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga	21	Tabel 6.2	Perkembangan TPT	44
Tabel 3.6	Inflasi Kelompok Kesehatan	22	Tabel 6.3	Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor	44
Tabel 3.7	Inflasi Kelompok Transportasi	22	Tabel 6.4	Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)	44
Tabel 3.8	Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Keuangan	22	Tabel 6.5	Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan	45
			Tabel 6.6	Nilai Tukar Petani	45
			Tabel 6.7	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	46
			Tabel 6.8	Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)	46
			Tabel 7.1	Angka Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia di Tahun 2025 (% ,yoy)	50

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Triwulan II 2025 (% ,yoy)	2	Grafik 1.30	Pertumbuhan Lapangan Usaha Akmamin	9
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi	2	Grafik 1.31	Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara	9
Grafik 1.3	Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Triwulan II 2025	3	Grafik 1.32	Perkembangan Pembiayaan Perhotelan	9
Grafik 1.4	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	3	Grafik 2.1	Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh	15
Grafik 1.5	Perkembangan Pembiayaan Konsumsi	3	Grafik 3.1	Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan II 2025 (% ,yoy)	20
Grafik 1.6	Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	3	Grafik 3.2	Perkembangan Harga Emas Dunia	23
Grafik 1.7	Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan	3	Grafik 3.3	Perkembangan Survei Konsumen	23
Grafik 1.8	Pertumbuhan PMTB	4	Grafik 3.4	Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh (% ,yoy)	24
Grafik 1.9	Perkembangan Pembiayaan Investasi	4	Grafik 4.1	Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank)	28
Grafik 1.10	Pertumbuhan Ekspor Barang & Jasa	4	Grafik 4.2	Perkembangan Dana Pihak Ketiga	28
Grafik 1.11	Perkembangan Ekspor Batubara	4	Grafik 4.3	Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Proyek)	28
Grafik 1.12	Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh	5	Grafik 4.4	Perkembangan <i>Non-Performing Financing</i> (Berdasarkan Lokasi Bank)	28
Grafik 1.13	Pertumbuhan Impor Barang & Jasa	5	Grafik 4.5	Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank)	29
Grafik 1.14	Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri	5	Grafik 4.6	Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Proyek)	29
Grafik 1.15	Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan II 2025	5	Grafik 4.7	Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank)	29
Grafik 1.16	Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian	6	Grafik 4.8	Perkembangan DPK berdasarkan Jenis	29
Grafik 1.17	Perkembangan Produksi Padi	6	Grafik 4.9	Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)	29
Grafik 1.18	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	6	Grafik 4.10	Perkembangan DPK Perseorangan	30
Grafik 1.19	Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan	6	Grafik 4.11	Perkembangan DPK Pemerintah	30
Grafik 1.20	Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan	6	Grafik 4.12	Perkembangan DPK Korporasi	30
Grafik 1.21	Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	7	Grafik 4.13	Perkembangan Pembiayaan (Lokasi Proyek)	30
Grafik 1.22	Perkembangan Pengadaan Semen	7	Grafik 4.14	Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan	31
Grafik 1.23	Pertumbuhan PMTB	7	Grafik 4.15	Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha	31
Grafik 1.24	Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan	7	Grafik 4.16	Perkembangan Pembiayaan UMKM	31
Grafik 1.25	Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan	8			
Grafik 1.26	Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	8			
Grafik 1.27	Perkembangan Penumpang Kapal di Pelabuhan Ulee Lheue	8			
Grafik 1.28	Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	8			
Grafik 1.29	Perkembangan SKDU Sektor Industri Pengolahan	8			

Daftar Grafik

Grafik 5.1	Netflow Kas (Rp Triliun)	36
Grafik 5.2	Pertumbuhan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> (% ,yoy)	36
Grafik 5.3	Temuan Uang Palsu (Lembar)	36
Grafik 5.4	Perkembangan Nominal SKNBI	36
Grafik 5.5	Perkembangan Volume SKNBI	37
Grafik 5.6	Perkembangan Nominal BI-RTGS	37
Grafik 5.7	Perkembangan Volume BI-RTGS	37
Grafik 5.8	Transaksi ATM Debit	37
Grafik 5.9	Transaksi Kartu Kredit	37
Grafik 5.10	Perkembangan Transaksi UE	38
Grafik 5.11	Pertumbuhan <i>Merchant</i> QRIS	38
Grafik 5.12	Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS	38
Grafik 5.13	Transaksi KUPVA BB	39
Grafik 5.14	Disagregasi Transaksi UKA	39
Grafik 5.15	Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)	40
Grafik 5.16	Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)	40
Grafik 5.17	Perkembangan Program Sembako (Nominal)	40
Grafik 5.18	Perkembangan Program Sembako (KPM)	40
Grafik 6.1	Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera (%)	44
Grafik 6.2	Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota	45
Grafik 6.3	Penduduk Miskin di Sumatera (%)	46
Grafik 6.4	Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah	46



Ringkasan Eksekutif

Ekonomi Aceh pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 4,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,59% (yoy).

Realisasi agregat belanja pemerintah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan II 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 2,19% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,53% (yoy).

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 tetap terjaga, tercermin dari rendahnya Non Performing Financing (NPF).

Selama triwulan II 2025, perkembangan sistem pembayaran konsisten berjalan lancar dalam mendorong perekonomian Provinsi Aceh.

Perkembangan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II 2025 tumbuh 4,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,59% (yoy). Kendati demikian, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang tumbuh 4,96% (yoy), maupun nasional 5,12% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. Sementara itu pada sisi permintaan, pertumbuhan perekonomian Aceh didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid dan masih tingginya kinerja ekspor.

Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi agregat belanja dan pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan II 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah pada triwulan laporan mencapai Rp32,61 triliun (38,01%). Sementara itu, realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Aceh pada Triwulan I 2025 sebesar Rp15,66 triliun (33,28%).

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 2,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian inflasi pada triwulan sebelumnya 1,53% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi Provinsi Aceh pada triwulan II 2025, terutama bersumber dari kebijakan pemberian diskon tarif listrik yang berakhir pada April 2025. Untuk keseluruhan tahun 2025, capaian inflasi Aceh masih sesuai dengan sasaran target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 tetap terjaga, tercermin dari rendahnya *Non Performing Financing* (NPF) di tengah kinerja pembiayaan yang tercatat tumbuh 10,37% (yoy). Lebih lanjut, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat sebesar 3,27% (yoy). Di sisi lain, rasio pembiayaan untuk UMKM tercatat sebesar 27,22%.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan II 2025, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi *net inflow* pada triwulan laporan. Sementara, metode pembayaran non tunai seperti, penggunaan kartu debit, uang elektronik, dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan Aceh mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I dan triwulan II 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan pada Februari 2025. Angka kemiskinan turut mengalami penurunan pada Maret 2025. Namun demikian, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, kemiskinan di Aceh masih tertinggi, sementara TPT berada pada peringkat ketiga tertinggi.

Indikator kesejahteraan Aceh mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I dan triwulan II 2025.

Prospek Perekonomian

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2025 secara keseluruhan diprakirakan tetap kuat berada di kisaran 4,41%-4,81% (yoy), berpotensi melambat dibandingkan angka pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,66% (yoy). Tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh ditopang oleh masih positifnya pertumbuhan investasi dan ekspor luar negeri, dan terjaganya konsumsi rumah tangga. Secara keseluruhan tahun 2025, laju inflasi Provinsi Aceh diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam range sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy) dengan strategi pengendalian inflasi melalui 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh secara keseluruhan diprakirakan tetap kuat berada di kisaran 4,41%-4,81% (yoy), berpotensi melambat dibandingkan angka pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,66% (yoy).



Tabel Indikator

A. PDRB

PDRB ADHK BERDASARKAN LAPANGAN USAHA (SEKTORAL)

SEKTORAL (RP TRILIUN)	2023		2024				2025	
	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,03	11,61	10,49	9,83	10,07	11,74	10,58	10,51
Pertambangan dan Penggalian	2,72	2,57	2,58	3,01	2,91	2,95	3,11	3,04
Industri Pengolahan	1,61	1,67	1,56	1,62	1,66	1,71	1,65	1,73
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	3,56	4,11	3,30	3,47	3,78	4,11	3,27	3,46
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,69	6,27	5,83	5,84	5,92	6,27	6,18	6,19
Transportasi dan Pergudangan	2,47	2,43	2,59	2,88	2,95	2,94	2,84	3,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,56	0,59	0,55	0,55	0,59	0,59	0,58	0,59
Informasi dan Komunikasi	1,62	1,63	1,64	1,65	1,70	1,64	1,64	1,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,37	0,57	0,56	0,57	0,59	0,57	0,56	0,57
Real Estate	1,62	1,52	1,56	1,56	1,62	1,59	1,57	1,65
Jasa Perusahaan	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24	0,23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,13	3,25	3,03	3,48	3,33	3,49	3,27	3,47
Jasa Pendidikan	0,97	0,94	0,99	1,04	1,04	1,01	1,00	1,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,33	1,21	1,13	1,28	1,38	1,33	1,22	1,32
Jasa lainnya	0,62	0,55	0,57	0,63	0,64	0,60	0,60	0,64
PDRB	36,61	39,23	36,70	37,72	38,50	40,85	38,28	39,54

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

PDRB ADHK BERDASARKAN PENGELUARAN (RP TRILIUN)

KOMPONEN (RP TRILIUN)	2023		2024				2025	
	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Konsumsi Rumah Tangga	19,99	20,03	20,39	20,83	20,76	20,89	21,41	21,86
Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0,67	0,83	0,87	0,75	0,80	0,89	0,86	0,86
Konsumsi Pemerintah	5,83	7,17	4,15	6,36	6,19	8,10	4,48	5,76
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	12,01	12,32	11,58	12,49	12,82	13,09	11,57	12,22
Perubahan Inventori	0,42	-0,16	0,32	-0,12	0,13	-0,11	0,67	0,63
Ekspor Barang dan Jasa	20,11	21,42	18,05	18,21	21,61	23,73	22,34	21,41
Impor Barang dan Jasa	22,42	22,38	18,66	20,78	23,81	25,75	22,94	22,65
PDRB	36,61	39,23	36,70	37,72	38,50	40,85	38,38	39,54

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

PERTUMBUHAN PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA (% , YOY)

SEKTORAL (RP TRILIUN)	2023		2024				2025	
	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,70%	8,54%	7,04%	-3,55%	0,38%	1,11%	0,91%	6,93%
Pertambangan dan Penggalian	-1,82%	-6,10%	5,90%	17,24%	6,86%	14,68%	19,02%	1,12%
Industri Pengolahan	-2,89%	-1,97%	4,69%	1,50%	2,92%	2,81%	5,49%	6,50%
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	7,94%	8,85%	9,22%	4,86%	4,49%	3,93%	-4,77%	0,53%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,31%	2,00%	6,44%	0,31%	0,89%	0,25%	1,14%	5,82%
Konstruksi	1,36%	2,65%	3,90%	8,54%	6,02%	0,05%	-0,11%	-0,28%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,68%	10,23%	1,68%	4,91%	3,96%	-0,02%	5,87%	6,13%
Transportasi dan Pergudangan	9,47%	6,27%	10,65%	15,69%	19,46%	21,12%	9,76%	13,37%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,38%	9,16%	3,76%	0,97%	6,36%	0,34%	6,26%	5,97%
Informasi dan Komunikasi	0,18%	0,90%	0,45%	1,13%	5,36%	0,50%	0,03%	2,96%
Jasa Keuangan dan Asuransi	-26,95%	5,14%	-0,35%	52,01%	58,69%	0,29%	0,34%	0,96%
Real Estate	2,09%	4,72%	5,09%	4,95%	0,10%	4,32%	1,13%	6,45%
Jasa Perusahaan	-2,31%	-0,02%	2,79%	6,77%	7,38%	0,54%	0,60%	-2,24%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,78%	-0,39%	9,08%	7,17%	6,39%	7,48%	7,81%	-0,22%
Jasa Pendidikan	6,76%	-8,47%	1,72%	1,65%	6,76%	7,71%	0,73%	2,28%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,69%	-3,48%	-5,74%	1,39%	3,70%	9,40%	7,99%	3,46%
Jasa lainnya	8,49%	-0,81%	0,25%	3,10%	4,09%	9,12%	4,69%	3,15%
PDRB	3,78%	4,15%	4,82%	4,54%	5,17%	4,15%	4,59%	4,82%

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

PERTUMBUHAN PDRB BERDASARKAN PENGELUARAN (% , YOY)

KOMPONEN GROWTH (% , YOY)	2023		2024				2025	
	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Konsumsi Rumah Tangga	4,06%	5,80%	4,93%	4,24%	3,85%	4,32%	4,99%	4,97%
Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0,59%	21,88%	29,34%	10,67%	18,95%	7,51%	-1,11%	16,32%
Konsumsi Pemerintah	1,41%	-8,70%	21,10%	6,89%	5,36%	12,44%	7,99%	-9,40%
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,46%	4,76%	0,77%	6,36%	5,95%	5,49%	-0,11%	-2,13%
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	18,02%	17,75%	10,14%	-3,74%	7,68%	11,31%	23,75%	17,62%
Impor Barang dan Jasa	19,41%	12,71%	11,59%	-0,37%	5,75%	14,91%	22,94%	8,99%
PDRB	3,78%	4,15%	4,82%	4,54%	5,17%	4,15%	4,59%	

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

B. INFLASI

INFLASI (% YOY)	2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Banda Aceh	5,32	2,70	1,40	1,53	2,52	2,07	1,84	2,16	1,36	2,63
Lhokseumawe	5,35	2,69	2,55	1,56	2,79	2,97	2,11	2,79	1,63	2,07
Meulaboh	6,27	2,69	2,10	1,42	4,39	3,94	2,40	3,29	1,46	3,07
Aceh Tamiang					3,38	3,14	0,99	1,77	1,28	1,33
Aceh Tengah					4,51	4,78	0,47	1,63	2,02	1,97
Provinsi Aceh	5,46	2,70	1,83	1,53	3,25	3,09	1,50	2,17	1,53	2,19

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

C. PERBANKAN

INDIKATOR UMUM

INDIKATOR	2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total Aset (Rp Triliun)	51,04	52,03	53,77	57,84	56,03	57,67	59,99	63,93	61,30	62,46
Pertumbuhan (yoy)%	2,35	-1,66	2,26	8,68	9,78	10,85	11,57	10,54	9,41	8,31
DPK (Rp Triliun)	38,98	38,86	39,87	41,93	41,39	43,35	44,70	45,67	43,33	44,77
Pertumbuhan (yoy)%	1,34	-5,47	0,41	5,78	6,18	11,56	12,11	8,92	4,67	3,27
Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)	35,42	36,10	37,48	38,57	39,07	40,81	42,52	43,98	44,49	45,04
Pertumbuhan (yoy)%	10,99	10,09	12,07	12,68	10,28	13,04	13,45	14,04	13,89	10,40
FDR %	90,87	92,90	94,02	92,00	94,38	94,14	95,14	96,32	102,67	100,60
NPF-gross %	1,82	1,96	1,80	1,57	1,68	1,61	1,64	1,79	1,95	2,06
NPF-Nominal (Rp Triliun)	0,64	0,71	0,67	0,61	0,66	0,66	0,70	0,78	0,86	0,92

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

PERKEMBANGAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)/SIMPANAN

SIMPANAN	2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total (Rp Triliun)	38,98	38,86	39,87	41,93	41,39	43,35	44,70	45,67	43,33	44,77
Pertumbuhan (yoy)%	1,34	-5,47	0,41	5,78	6,18	11,56	12,11	8,92	4,67	3,27
Giro (Rp Triliun)	6,90	6,73	8,19	5,70	7,92	8,81	10,51	6,00	6,56	7,41
Pertumbuhan (yoy)%	-34,94	-27,23	12,33	-9,66	14,71	30,85	28,41	5,15	-17,11	-15,91
Tabungan (Rp Triliun)	21,545	22,52	22,07	24,99	22,99	24,35	24,19	27,11	25,63	25,51
Pertumbuhan (yoy)%	6,27	4,97	3,43	4,33	6,71	8,12	9,60	8,50	11,49	4,79
Deposito (Rp Triliun)	10,533	9,61	9,62	11,24	10,48	10,19	10,00	12,56	11,12	11,85
Pertumbuhan (yoy)%	38,94	-7,63	-13,23	19,87	-0,47	6,08	3,98	11,76	6,16	16,25

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

KREDIT/PEMBIAYAAN BERDASARKAN TUJUAN PENGGUNAAN

PINJAMAN	2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total Kredit (Rp Triliun)	35,42	36,1	37,48	38,57	39,07	40,81	42,52	43,98	44,49	45,04
Pertumbuhan (yoy) %	10,99	10,09	12,07	12,68	10,28	13,04	13,45	14,02	13,89	10,40
Modal Kerja (Rp Triliun)	6,51	66,14	6,75	6,82	6,52	7,19	7,43	7,29	7,03	6,88
Pertumbuhan (yoy)%	-11,27	-12,79	-7,06	0,14	0,05	8,65	10,07	6,89	8,20	-4,00
Investasi (Rp Triliun)	4,18	4,56	5,25	5,63	5,88	6,30	6,77	7,52	7,74	7,74
Pertumbuhan (yoy)%	52,56	53,45	59,27	55,26	40,41	38,20	28,91	33,57	31,62	22,85
Konsumsi (Rp Triliun)	14,72	24,92	25,48	26,12	26,67	27,32	28,32	29,16	29,70	30,40
Pertumbuhan (yoy)%	13,25	12,1	11,33	9,77	7,87	9,60	11,15	11,63	11,37	11,31

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

PINJAMAN	2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total Kredit (Rp Triliun)	48,38	48,97	49,88	49,91	48,66	49,76	51,11	51,87	52,64	51,87
Pertumbuhan (yoy) %	2,49	2,65	5,91	1,25	0,57	1,61	2,46	4,66	8,21	4,27
Modal Kerja (Rp Triliun)	12,07	12,62	12,47	12,15	11,42	11,77	11,82	12,87	11,52	10,31
Pertumbuhan (yoy)%	-13,98	-7,61	1,84	-5,79	-5,42	-6,78	-5,22	1,98	1,02	-12,32
Investasi (Rp Triliun)	9,75	9,62	10,15	9,82	8,77	8,91	9,23	9,37	9,85	9,65
Pertumbuhan (yoy)%	8,8	2,30	5,79	-4,13	-10,16	-7,43	-9,15	-8,53	12,38	8,35
Konsumsi (Rp Triliun)	26,55	16,72	27,26	27,94	28,47	29,08	30,06	30,38	31,26	31,90
Pertumbuhan (yoy)%	9,69	8,49	7,93	6,83	7,03	8,83	10,29	10,74	9,81	9,73

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

KREDIT/PEMBIAYAAN BERDASARKAN TUJUAN PENGGUNAAN

SEKTOR (RP TRILIUN)	2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pertanian	1,74	1,92	2,20	2,32	2,33	3,01	3,28	3,44	3,50	3,48
Perikanan	0,30	0,29	0,30	0,30	0,32	0,31	0,31	0,30	0,28	0,28
Pertambangan	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,13	0,11	0,13	0,19
Ind. Pengolahan	1,06	1,16	1,24	1,30	1,31	1,34	1,34	1,55	1,48	1,33
Listrik, Gas & Air	0,06	0,07	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
Konstruksi	0,51	0,58	0,62	0,62	0,54	0,57	0,54	0,52	0,46	0,59
Perdagangan	5,26	5,29	5,47	5,59	5,52	5,77	6,04	6,25	6,21	6,08
Hotel & Restoran	0,31	0,35	0,41	0,44	0,47	0,51	0,53	0,56	0,62	0,63
Transportasi, Gudang & Kom.	0,21	0,22	0,23	0,26	0,27	0,28	0,31	0,33	0,34	0,33
Perantara Keuangan	0,14	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02
Perumahan, usaha sewa & Js. Perusahaan	0,20	0,23	0,23	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28	0,27	0,26
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,04	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	0,23	0,24	0,28	0,31	0,31	0,31	0,35	0,37	0,38	0,42
Jasa Kemasyarakatan	0,54	0,61	0,71	0,77	0,77	0,81	0,82	0,83	0,82	0,79
Jasa Perseorangan	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keg. Yg. Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap. Usaha	24,72	24,93	25,48	26,12	26,67	27,32	28,32	29,16	29,70	30,41
TOTAL	35,42	36,10	37,48	38,57	39,07	40,81	42,52	43,98	44,48	45,04

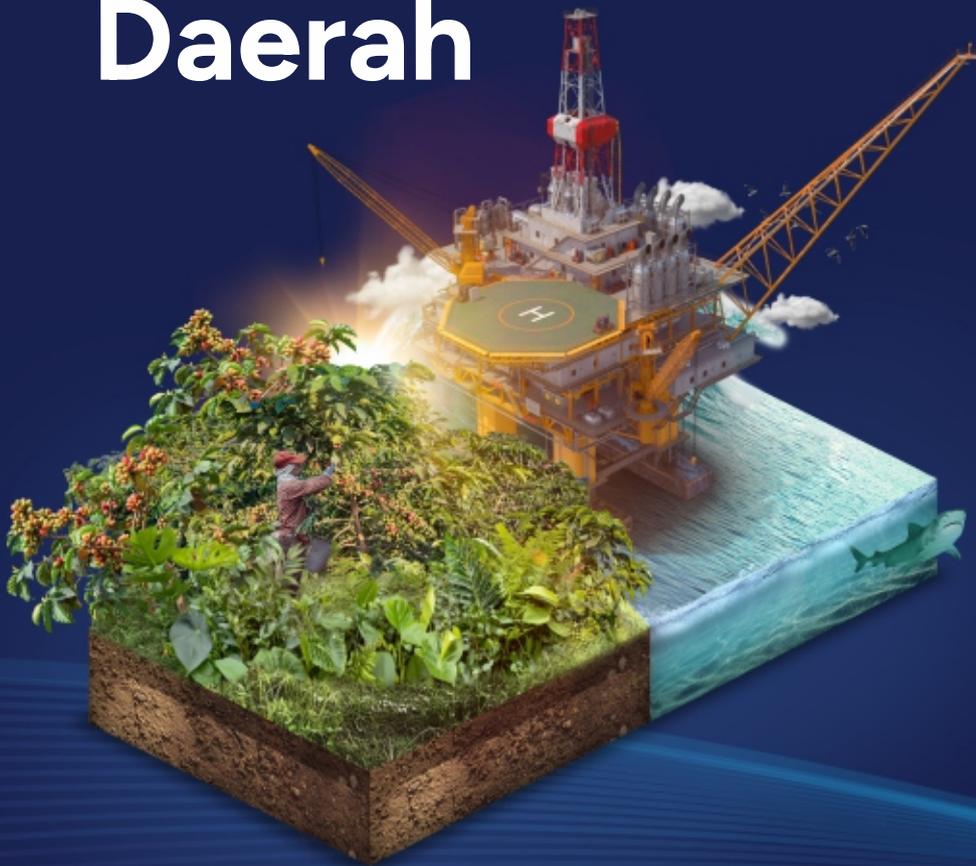
Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

SEKTOR (RP TRILIUN)	2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pertanian	3,44	3,79	4,05	4,12	4,15	4,58	4,56	4,77	4,79	4,74
Perikanan	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,32	0,31	0,31	0,28	0,28
Pertambangan	0,11	2,47	2,27	2,42	1,48	1,16	1,35	1,81	1,78	0,41
Ind. Pengolahan	1,55	4,13	3,97	3,86	4,30	4,43	4,22	3,22	3,70	3,93
Listrik, Gas & Air	0,11	0,27	0,33	0,33	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,40
Konstruksi	0,52	0,82	0,93	0,92	0,89	0,86	0,94	0,88	0,86	0,92
Perdagangan	6,25	6,66	6,85	6,34	6,27	6,48	6,72	6,88	6,90	6,52
Hotel & Restoran	0,56	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,63	0,65	0,67	0,67
Transportasi, Gudang & Kom.	0,33	0,30	0,36	0,38	0,38	0,38	0,36	0,38	0,38	0,40
Perantara Keuangan	0,03	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,04
Perumahan, usaha sewa & Js. Perusahaan	0,28	2,01	1,92	1,52	0,26	0,27	0,29	0,30	0,30	0,29
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,09	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08
Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	0,37	0,26	0,29	0,32	0,32	0,33	0,36	0,38	0,39	0,43
Jasa Kemasyarakatan	0,83	0,62	0,73	0,78	0,78	0,82	0,84	0,85	0,84	0,81
Jasa Perseorangan	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keg. Yg. Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap. Usaha	29,16	26,72	27,26	27,94	28,47	29,08	30,06	30,77	31,26	31,90
TOTAL	43,98	48,97	49,88	49,91	48,66	49,76	51,11	51,64	52,64	51,87

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

01.

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah



01.

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II 2025 tumbuh 4,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,59% (yoy). Kendati demikian, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang tumbuh 4,96% (yoy), maupun nasional 5,12% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. Sementara itu pada sisi permintaan, pertumbuhan perekonomian Aceh didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid dan masih tingginya kinerja ekspor.



1.1 Gambaran Umum

Perekonomian Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 tumbuh tinggi dan tetap solid. Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Provinsi Aceh tercatat tumbuh 4,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,59% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan turut didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. Sementara itu pada sisi permintaan, pertumbuhan perekonomian Aceh didorong konsumsi rumah tangga yang tetap solid dan masih tingginya kinerja ekspor.

Kinerja Perekonomian Triwulan II 2025

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan angka triwulan sebelumnya. Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,87% (yoy). Sementara itu, ekonomi Sumatera pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 4,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,85% (yoy) (Grafik 1.1).

Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Sumatera, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada periode laporan, ekonomi Provinsi Aceh tumbuh sebesar 4,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,59% (yoy) (Grafik 1.2). Kendati demikian, kinerja ekonomi Provinsi Aceh tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera maupun Nasional.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Tw II 2025 (% yoy)



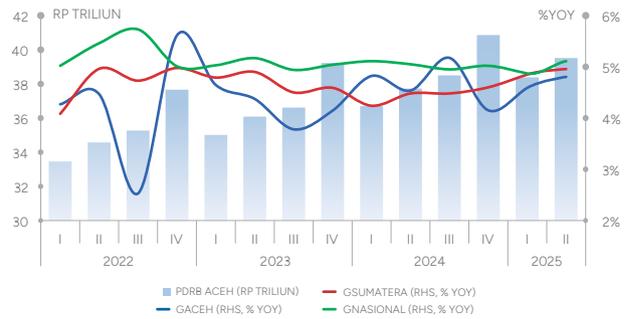
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Dari sisi penawaran, kinerja LU yang terkait dengan konsumsi RT dan ekspor mengalami peningkatan, yaitu LU Pertanian, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Transportasi dan Pergudangan. Meningkatnya pertumbuhan pada LU Pertanian turut dipengaruhi oleh panen raya pada bulan April, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), dan penetapan harga Gabah Kering Panen (GKP). Selain dari itu, adanya peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat pada beberapa periode HBKN yaitu libur Idul Fitri di awal bulan April,

tambahan hari libur pada HBKN Waisak dan Kenaikan Isa Almasih pada bulan Mei, serta Idul Adha pada bulan Juni, menjadi pendorong kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Transportasi dan Pergudangan.

Sementara itu dari sisi permintaan, pendorong pertumbuhan berasal dari tetap tingginya konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor. Tingginya konsumsi rumah tangga didorong oleh peningkatan pengeluaran untuk konsumsi dan mobilitas selama hari libur nasional yang terjadi pada triwulan II. Selain itu, peningkatan kinerja pertanian dan NTP juga turut meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok masyarakat perdesaan dan kelompok petani. Di sisi lain, kinerja ekspor yang tetap tinggi dapat dikaitkan dengan masih kuatnya permintaan batu bara dari India, serta front loading komoditas kopi oleh importir dari AS untuk menghindari kebijakan tarif resiprokal dan perang dagang.

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi tersebut, kontribusi Provinsi Aceh terhadap ekonomi Sumatera sebesar 4,89%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,91%. Dengan proporsi tersebut, Provinsi Aceh masih menjadi salah satu provinsi dengan perekonomian terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (2,18%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,24%). Adapun provinsi dengan kontribusi terbesar ke perekonomian Sumatera adalah Sumatera Utara (23,50%), Riau (22,45%), dan Sumatera Selatan (13,58%).

1.2. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh bersumber dari tetap tingginya konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor barang dan jasa. Konsumsi rumah tangga memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yakni sebesar 2,74%, pertumbuhan tersebut turut didorong oleh peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat pada periode libur HBKN (Grafik 1.3). Lebih lanjut, ekspor Barang dan Jasa menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dari sisi permintaan pada triwulan II 2025. Adapun

Ekspor Barang dan Jasa memberikan andil pertumbuhan sebesar 8,50%.

Kendati demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh menurunnya kinerja konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah tercatat mengalami kontraksi sebesar -9,40% (yoy) dan memberikan andil sebesar -1,59% terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.

Grafik 1.3. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Triwulan II 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan II 2025, konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat. Konsumsi rumah tangga pada periode laporan tumbuh sebesar 4,97% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,99% (yoy) (Grafik 1.4). Dengan tingkat pertumbuhan ini, konsumsi rumah tangga memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,74%. Angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, turut didukung oleh tingkat inflasi yang terjaga, serta peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat pada HBKN Idul Fitri di bulan April, *long weekend* HBKN Waisak dan Kenaikan Isa Almasih pada bulan Mei, serta HBKN Idul Adha pada bulan Juni.

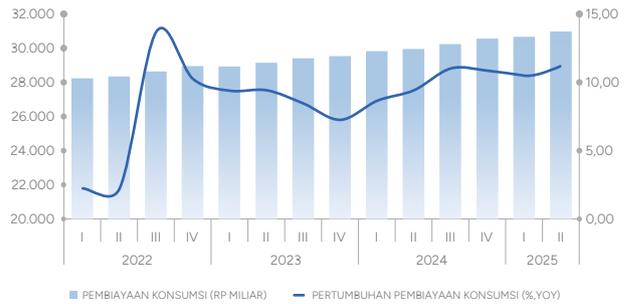
Kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, turut ditopang oleh masih tingginya pembiayaan konsumsi. Pembiayaan konsumsi pada triwulan II 2025 masih tumbuh kuat sebesar 10,45% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 9,81% (yoy) (Grafik 1.5).

Grafik 1.4. Pertumbuhan Konsumsi RT



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik 1.5. Perkembangan Pembiayaan Konsumsi

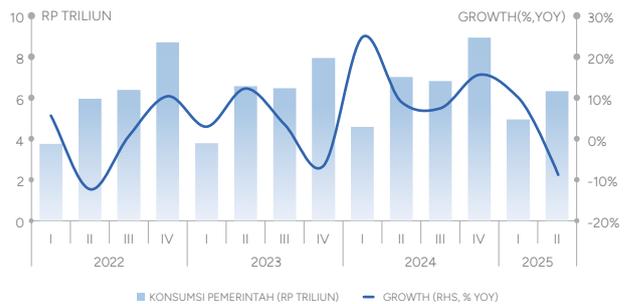


Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Konsumsi Pemerintah

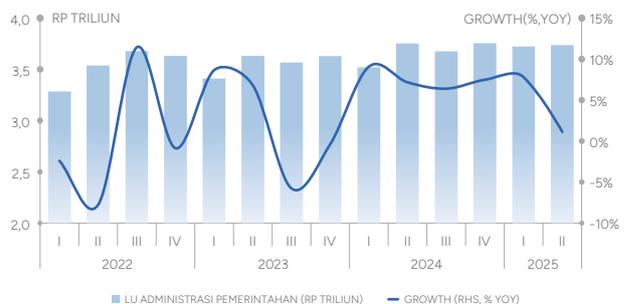
Kinerja konsumsi pemerintah terkontraksi, seiring dengan adanya realokasi anggaran. Pada triwulan II 2025, konsumsi pemerintah tercatat mengalami kontraksi sebesar -9,41% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 7,99% (yoy) (Grafik 1.6). Terkontraksinya konsumsi pemerintah pada triwulan II juga tercermin pada kinerja LU Administrasi Pemerintah yang tercatat terkontraksi sebesar -0,22% (yoy) (Grafik 1.7).

Grafik 1.6. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik 1.7. Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan



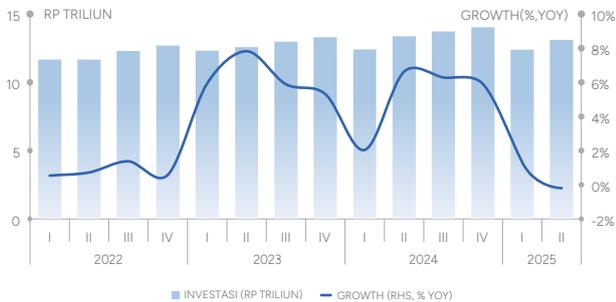
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Menurunnya tingkat konsumsi pemerintah juga seiring dengan terkontraksinya perkembangan realisasi APBD. Realisasi Belanja Daerah per 30 Juni 2025 mencapai Rp12,48 Triliun atau sebesar 30,47% dari total pagu anggaran. Secara keseluruhan angka realisasi tersebut terkontraksi sebesar -10,44% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu dengan realisasi sebesar Rp13,93 Triliun atau sebesar 34,26% dari total pagu anggaran.

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pada triwulan II 2025, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Provinsi Aceh tercatat mengalami kontraksi yang lebih dalam. PMTB Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 terkontraksi sebesar -2,13% (yoy) lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -0,11% (yoy) (Grafik 1.8.). Terkontraksinya PMTB salah satunya dikarenakan oleh turunnya realisasi anggaran Belanja Modal per data 30 Juni 2025 yang terkontraksi sebesar -39,16% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu.

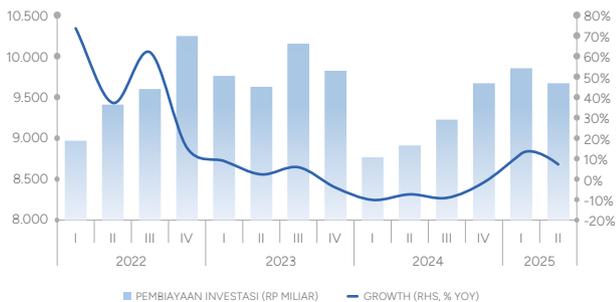
Grafik 1.8. Pertumbuhan PMTB



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Sejalan dengan turunnya tingkat PMTB, pembiayaan investasi pada triwulan laporan juga tercatat mengalami perlambatan. Pembiayaan investasi secara nominal mengalami penurunan dari Rp9,85 triliun pada triwulan I 2025 menjadi Rp9,66 triliun pada triwulan II 2025. Secara tahunan, angka realisasi tersebut tumbuh sebesar 8,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,37% (yoy). (Grafik 1.9).

Grafik 1.9. Perkembangan Pembiayaan Investasi

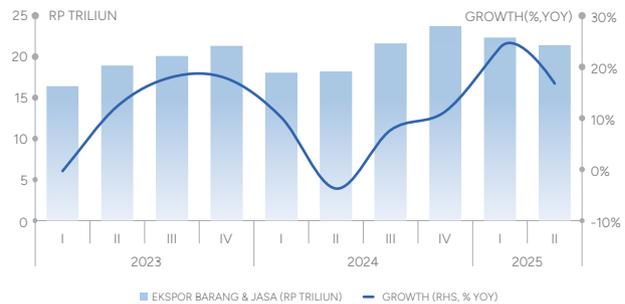


Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

Ekspor Barang dan Jasa

Kinerja ekspor barang dan jasa Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 masih relatif kuat dengan tumbuh double digit, meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 17,62% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 23,31% (yoy) (Grafik 1.10). Melambatnya kinerja ekspor khususnya dipengaruhi oleh lebih terbatasnya kinerja ekspor batu bara.

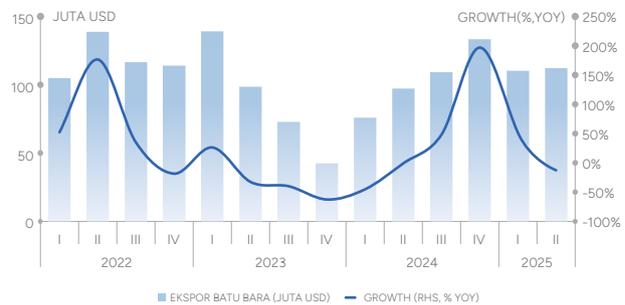
Grafik 1.10. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Ekspor batubara tumbuh melambat meski masih menjadi faktor pendorong meningkatnya kinerja ekspor. Pada triwulan II 2025, ekspor barang dan jasa Provinsi Aceh utamanya ditopang oleh ekspor batu bara dengan pangsa sebesar 80,82%. Ekspor batu bara pada triwulan II 2025 masih tumbuh solid sebesar 15,09% (yoy), kendati terdeselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 42,62% (yoy) (Grafik 1.11). Deselerasi ekspor batu bara dapat dikaitkan dengan berkurangnya permintaan dari India yang memiliki pangsa sebesar 96,29% dari total ekspor batu bara. Penurunan permintaan India dikarenakan oleh tidak tercapainya target konsumsi listrik domestik India pada triwulan sebelumnya, serta masih tingginya stok cadangan batu bara domestik India.

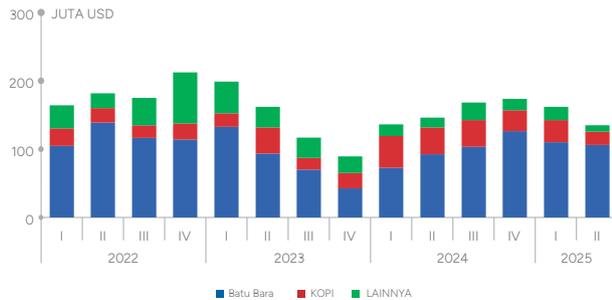
Grafik 1.11. Perkembangan Ekspor Batu Bara



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Kinerja ekspor komoditas lainnya juga tercatat mengalami perlambatan. Komoditas ekspor luar negeri Provinsi Aceh terbesar kedua setelah batu bara adalah kopi dengan pangsa 15,68% (Grafik 1.12). Pada triwulan II 2025, ekspor kopi Provinsi Aceh mencapai USD20,91 juta, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD32,14 juta. Adapun ekspor lainnya (pangsa 4,27%) umumnya terdiri dari komoditas rempah-rempah, minyak nabati, pupuk, produk kimia, dan ikan olahan. Pada periode laporan, ekspor lainnya memberikan nilai ekspor sebesar USD5,87 juta, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar USD5,69 juta.

Grafik 1.12. Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh

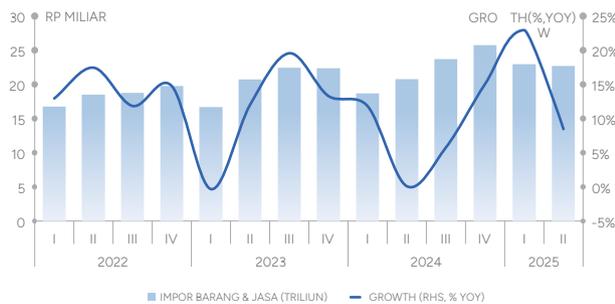


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Impor Barang dan Jasa

Kinerja impor barang dan jasa juga mengalami perlambatan pada triwulan laporan. Pada triwulan II 2025, impor barang dan jasa tumbuh sebesar 8,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 22,94% (yoy) (Grafik 1.13). Secara umum, kinerja impor barang dan jasa didominasi oleh impor komoditas gas bumi dengan pangsa mencapai 81,72% dari total impor pada triwulan laporan.

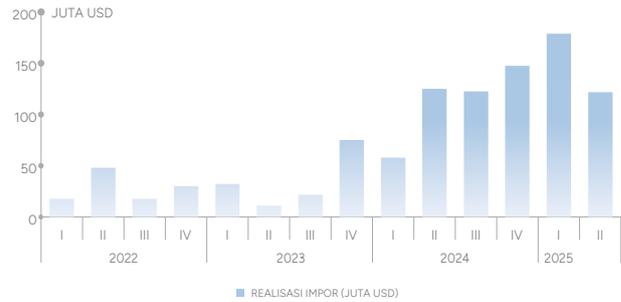
Grafik 1.13. Pertumbuhan Impor Barang dan Jasa



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Impor Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 yang tinggi didominasi oleh impor migas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor barang Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 sebesar USD122,36 juta, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya sebesar USD179,70 juta. (Grafik 1.14).

Grafik 1.14. Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri

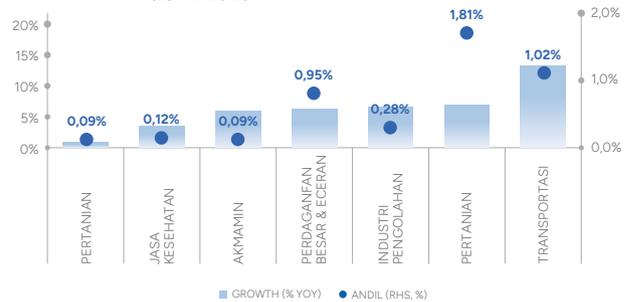


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

1.3. Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi penawaran, pertumbuhan utamanya didorong oleh meningkatnya kinerja LU Pertanian, LU Transportasi, dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Pada triwulan laporan LU Pertanian memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar sebesar 1,81% (yoy), LU Transportasi memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 1,02% (yoy), serta disusul oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 0,95% (yoy) (Grafik 1.15). Secara struktural, LU Pertanian masih memiliki pangsa terbesar bagi PDRB Provinsi Aceh yaitu sebesar 31,52%, disusul oleh LU Perdagangan sebesar 15,11%, LU Administrasi Pemerintahan sebesar 9,18%, serta LU Konstruksi sebesar 8,00%.

Grafik 1.15. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan II 2025

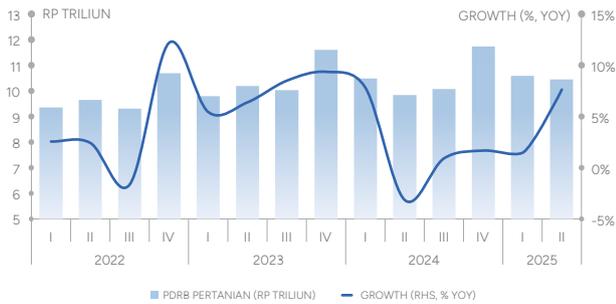


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kinerja LU Pertanian tercatat mengalami peningkatan tinggi pada triwulan laporan. LU Pertanian Provinsi Aceh pada triwulan II tumbuh sebesar 6,73% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,91% (yoy) (Grafik 1.16.). Meningkatnya kinerja LU Pertanian turut didorong oleh panen raya yang terjadi pada bulan April, peningkatan produktivitas pada kinerja perkebunan tahunan, serta kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP).

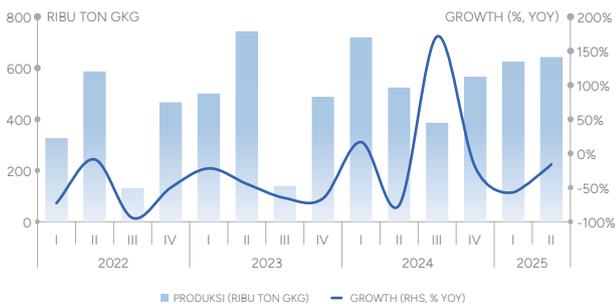
Grafik 1.16. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Produksi padi pada triwulan II 2025 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, produksi padi di Provinsi Aceh mencapai 484,41 ribu ton GKG atau tumbuh sebesar 22,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 470,92 ribu ton GKG atau tumbuh sebesar -13,15% (yoy). Peningkatan ini juga tercermin dari sisi pertumbuhan produksi padi yang tumbuh sebesar 14,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,33% (yoy) (Grafik 1.17).

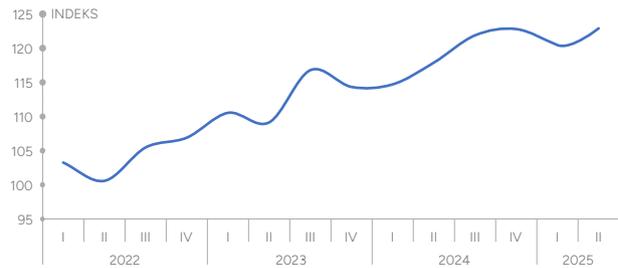
Grafik 1.17. Perkembangan Produksi Padi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Meningkatnya kinerja LU Pertanian juga tercermin pada peningkatan NTP pada triwulan laporan. NTP pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 123,20 atau meningkat sebesar 1,86% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 120,95 (Grafik 1.18.). Meningkatnya nilai NTP turut didorong oleh peningkatan pada Indeks Harga yang Diterima Petani (It) lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pada Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Indeks Harga yang Diterima Petani (It) tercatat meningkat dari 143,98 pada triwulan sebelumnya menjadi 148,06 pada triwulan laporan, atau meningkat sebesar 2,83%. Sedangkan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) hanya meningkat dari 119,03 dari triwulan sebelumnya menjadi 120,18 pada triwulan laporan atau meningkat sebesar 0,97%.

Grafik 1.18. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)



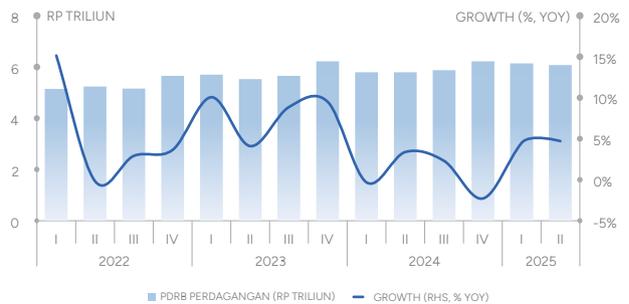
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kinerja LU Perdagangan terakselerasi pada triwulan II 2025.

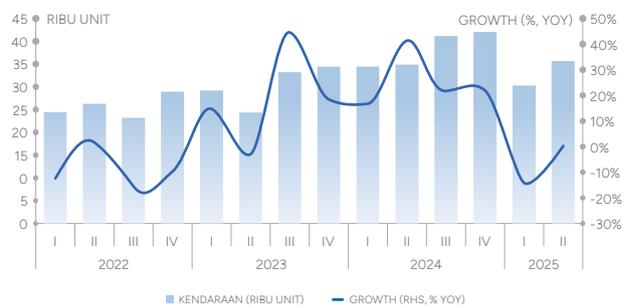
Pada triwulan II 2025, LU Perdagangan tercatat tumbuh sebesar 6,13% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,87% (yoy) (Grafik 1.19.). Tingginya angka pertumbuhan LU Perdagangan turut didorong oleh peningkatan permintaan selama HBKN Idul Fitri di bulan April, long weekend HBKN Waisak dan Kenaikan Isa Almasih pada bulan Mei, serta HBKN Idul Adha pada bulan Juni.

Grafik 1.19. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik 1.20. Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan



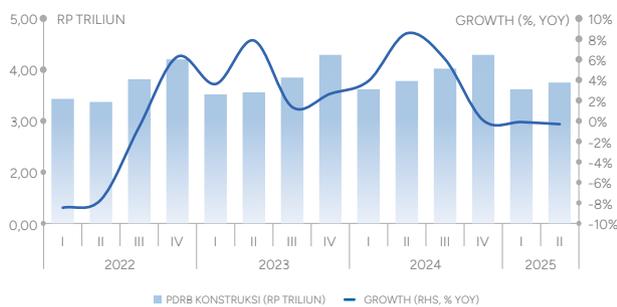
Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

Peningkatan kinerja LU Perdagangan juga tercermin pada total penjualan kendaraan. Pada triwulan laporan, total kendaraan yang terjual di Provinsi Aceh sejumlah 36.119 kendaraan atau tumbuh sebesar 2,24% (yoy). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dengan total penjualan kendaraan sejumlah 30.527 atau terkontraksi sebesar -12,23% (yoy) (Grafik 1.20).

Lapangan Usaha Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2025 tercatat mengalami kontraksi. Pada triwulan II 2025, LU Konstruksi tercatat terkontraksi sebesar -0,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -0,11% (yoy) (Grafik 1.21). Turunnya kinerja LU Konstruksi sejalan dengan masih terkontraksinya jumlah pengadaan semen, serta menurunnya kinerja Investasi/PMTB. Melambatnya LU Konstruksi juga seiring dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pengurangan Belanja Modal pemerintah daerah, serta seiring dengan keterbatasan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Grafik 1.21. Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pelambatan kinerja LU Konstruksi juga tercermin pada masih terkontraksinya realisasi pengadaan semen. Kinerja pengadaan semen pada triwulan laporan tercatat mengalami kontraksi sebesar -7,94% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -20,32% (yoy) (Grafik 1.22).

Grafik 1.22. Perkembangan Pengadaan Semen

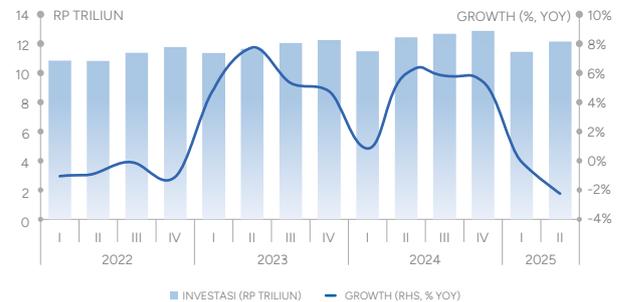


Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Masih terbatasnya realisasi pengadaan semen dapat dikaitkan dengan minimnya proyek konstruksi besar di Provinsi Aceh seiring dengan turunnya anggaran Belanja Modal pemerintah.

Melambatnya kinerja LU Konstruksi juga tercermin pada terkontraksinya kinerja Investasi. PMTB Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 terkontraksi sebesar -2,13% (yoy) lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -0,11% (yoy) (Grafik 1.23).

Grafik 1.23. Pertumbuhan PMTB

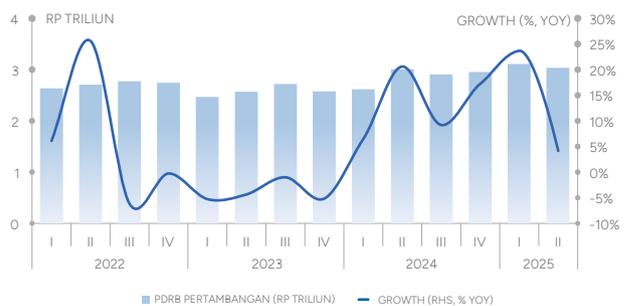


Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Lapangan Usaha Pertambangan

Kinerja LU Pertambangan pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh melambat, seiring dengan melambatnya permintaan batu bara oleh India. Pada triwulan II 2025, LU Pertambangan tercatat tumbuh sebesar 1,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 19,02% (yoy) (Grafik 1.24). Melambatnya pertumbuhan LU Pertambangan dapat dikaitkan dengan melambatnya kinerja ekspor batu bara. Melambatnya ekspor batu bara turut dipengaruhi oleh menurunnya permintaan dari India yang memiliki pangsa sebesar 96,29% dari total ekspor batu bara. Penurunan permintaan India dikarenakan oleh tidak tercapainya target konsumsi listrik domestik India pada triwulan sebelumnya, serta masih tingginya stok cadangan batu bara domestik India.

Grafik 1.24. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Perlambatan kinerja LU Pertambangan juga seiring dengan turunnya pembiayaan sektor pertambangan. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan sektor tambang tercatat mencapai Rp409,72 Miliar atau turun secara tahunan sebesar -64,78% (yoy). Penurunan secara tahunan ini lebih rendah dibandingkan angka triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 20,32% (yoy) (Grafik 1.25).

Grafik 1.25. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan

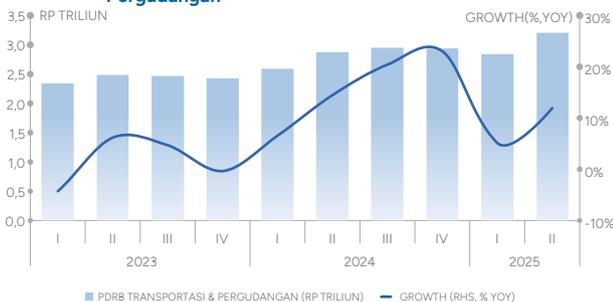


Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

Laju pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan II 2025 terakselerasi dan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2025, LU Transportasi dan Pergudangan tercatat tumbuh positif sebesar 13,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,76% (yoy) (Grafik 1.26). Tingginya pertumbuhan LU Transportasi turut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat selama HBKN Idul Fitri di bulan April, long weekend HBKN Waisak dan Kenaikan Isa Almasih pada bulan Mei, serta HBKN Idul Adha pada bulan Juni.

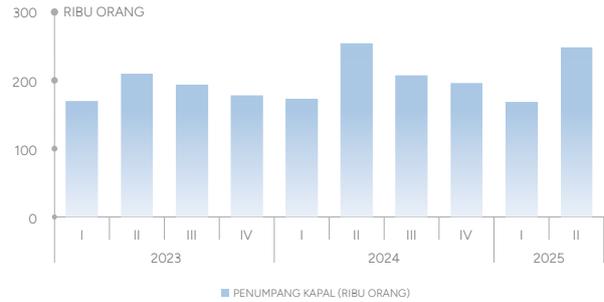
Grafik 1.26. Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Banyaknya hari libur nasional pada triwulan II turut mendorong peningkatan jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Ulee Lheue. Pada triwulan II 2025, jumlah penumpang kapal (berangkat dan datang) di Pelabuhan Ulee Lheue mencapai 251,59 ribu orang lebih tinggi dibandingkan total penumpang triwulan sebelumnya sejumlah 165,24 (Grafik 1.27).

Grafik 1.27. Perkembangan Penumpang Kapal di Pelabuhan Ulee Lheue

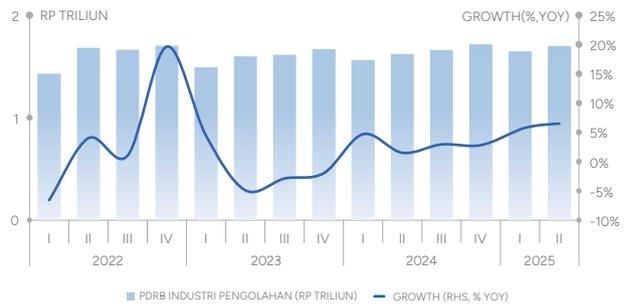


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Laju pertumbuhan LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2025 tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2025, LU Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 6,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,49% (yoy) (Grafik 1.28).

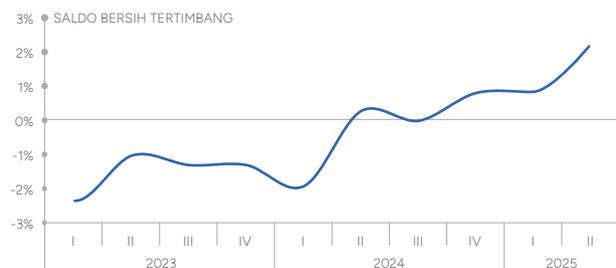
Grafik 1.28. Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan juga tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) SKDU LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2025 tercatat menjadi 1,81%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,58% (Grafik 1.29).

Grafik 1.29. Perkembangan SKDU Sektor Industri Pengolahan

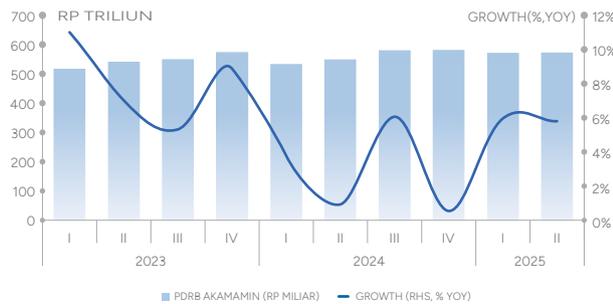


Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan II 2025 tercatat melambat. Pada triwulan II 2025, angka pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman tercatat tumbuh sebesar 5,97% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,26% (yoy) (Grafik 1.30.). Pertumbuhan ini turut didorong oleh mobilitas masyarakat pada HBKN Idul Fitri di bulan April, *long weekend* HBKN Waisak dan Kenaikan Isa Almasih pada bulan Mei, serta HBKN Idul Adha pada bulan Juni.

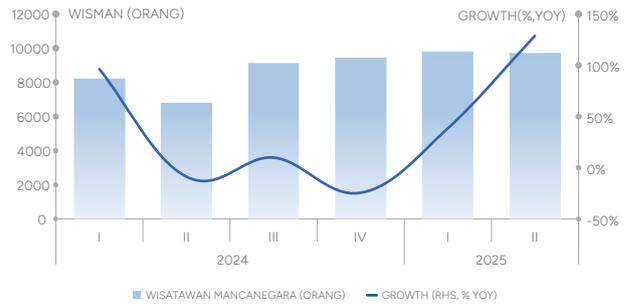
Grafik 1.30. Pertumbuhan Lapangan Usaha Akmamin



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kendati pertumbuhan sektor pariwisata mengalami perlambatan. Jumlah wisatawan mancanegara tercatat turun dari 9.929 wisatawan pada triwulan sebelumnya, menjadi 9.840 wisatawan pada triwulan laporan. Kendati demikian, secara tahunan angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 42,02% (yoy) atau terakselerasi dari triwulan sebelumnya sebesar 19,40% (yoy) (Grafik 1.31).

Grafik 1.31. Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Perlambatan pada LU Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman juga tercermin pada jumlah pembiayaan usaha perhotelan. Pada triwulan II 2025, pembiayaan usaha perhotelan tercatat sebesar Rp671,18 Miliar atau tumbuh sebesar 9,82% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,11% (yoy). (Grafik 1.32.).

Grafik 1.32. Perkembangan Pembiayaan Perhotelan



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi bank, diolah

Boks 1 :

Diversifikasi Sumber Pertumbuhan Dan Ketenagakerjaan Aceh: Industri Pengolahan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Berkelanjutan

Tabel Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

SEKTOR	Februari 2025 (%)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	40,02
Perdagangan Besar & Eceran	14,23
Pendidikan	7,55
Industri Pengolahan	7,40
Konstruksi	6,05
Akomodasi dan Makan Minum	6,05
Administrasi Pemerintahan	5,92
Jasa Lainnya	3,27

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

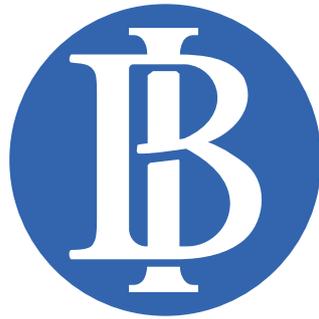
Struktur perekonomian di Aceh masih didominasi oleh sektor primer dan jasa. Hal ini tercermin pada besarnya pangsa dan peran LU Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Transportasi dan Pergudangan dalam menggerakkan pertumbuhan perekonomian Aceh. Secara keseluruhan, ketiga LU tersebut berkontribusi sebesar 54,24% dari total PDRB dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II 2025 sebesar 3,78% (yoy). Tidak hanya itu, ketiga LU tersebut juga memiliki total andil sebesar 57,36% dari total tenaga kerja di Provinsi Aceh.

Kendati perannya yang sangat strategis dan penting dalam menggerakkan perekonomian Aceh, tenaga kerja sektor tersebut masih didominasi oleh tenaga kerja informal.

Selain dari itu, ketergantungan pada sektor primer memiliki banyak keterbatasan, seperti kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas dan keterbatasan nilai tambah. Kerentanan ini tercermin pada pertumbuhan perekonomian Aceh yang cenderung tumbuh tinggi pada triwulan dengan musim panen, dan tumbuh rendah pada triwulan tanpa musim panen.

Minimnya kegiatan pengolahan juga menyebabkan Aceh lebih banyak mengekspor bahan mentah tanpa optimalisasi nilai tambah. Konsekuensinya, kontribusi sektor formal, terutama industri manufaktur dan industri pengolahan, masih jauh tertinggal dibanding provinsi lain di Sumatra.

Diversifikasi sumber pertumbuhan melalui penguatan industri pengolahan adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Aceh terhadap sektor primer dan perdagangan informal. Industrialisasi yang inklusif akan dapat memberikan sejumlah dampak sebagai berikut: I. Meningkatkan nilai tambah produk lokal; II. Memperluas lapangan kerja formal; III. Memperkuat daya saing Aceh di tingkat Nasional dan Internasional. Dengan kebijakan terarah dan kolaborasi multipihak, Aceh dapat membangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis pada penciptaan nilai tambah.



02.

Perkembangan Keuangan Daerah





Realisasi agregat belanja dan pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan II 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah pada triwulan laporan mencapai Rp32,61 triliun (38,01%). Sementara itu, realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Aceh pada Triwulan I 2025 sebesar Rp15,66 triliun (33,28%).



2.1. Gambaran umum

Secara nominal, realisasi agregat belanja pemerintah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan II 2025 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan II 2025, agregat belanja pemerintah (APBN + APBD) mencapai Rp32,61 triliun, menurun dibandingkan realisasi di tahun sebelumnya sebesar Rp37,36 triliun. Berdasarkan realisasi tersebut, belanja pemerintah menurun 12,77% (yoy) pada periode laporan. Lebih lanjut, jika dibandingkan terhadap pagu anggaran, realisasi belanja pemerintah pada triwulan II 2025 baru mencapai 38,01%, lebih rendah dari triwulan II 2024 sebesar 40,34%. Penurunan ini disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi belanja APBN maupun APBD di Provinsi Aceh.

Di sisi lain, realisasi agregat pendapatan pemerintah juga mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, realisasi pendapatan pemerintah (APBN + APBD) pada triwulan II 2025 mencapai Rp15,66 triliun, menurun -18,47% dibandingkan triwulan II 2024 yang sebesar Rp19,20 triliun. Penurunan tersebut didorong oleh realisasi pendapatan yang lebih rendah pada APBN maupun APBD. Lebih lanjut, jika dibandingkan terhadap pagu anggaran, realisasi pendapatan pemerintah juga mengalami penurunan. Persentase realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan II 2025 mencapai 33,28%, lebih rendah dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 41,19%.

2.2. Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah

Nilai pagu APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Provinsi Aceh mengalami peningkatan. Nilai pagu belanja APBD mencapai Rp40,97 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40,68 triliun. Nilai pagu tersebut naik 0,72% (yoy). Secara umum, pagu belanja APBD mengalami peningkatan utamanya pada belanja operasi dan belanja tidak terduga. Di sisi lain, nilai pagu pendapatan APBD mencapai Rp40,10 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp39,47 triliun. Nilai pagu tersebut naik 1,61% (yoy). Secara umum, pagu pendapatan APBD mengalami peningkatan utamanya pada pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah.

Tabel 2. 1. Realisasi Belanja APBD Triwulan II 2025

REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH TW-II 2025	
Belanja Operasi	33,08%
Belanja Modal	7,84%
Belanja Tidak terduga	4,84%
Belanja Transfer	33,28%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi belanja APBD di Provinsi Aceh hingga triwulan II 2025 mencapai Rp12,48 triliun atau 30,47% dari total pagu belanja. Persentase realisasi belanja APBD ini lebih rendah dibandingkan realisasi belanja di triwulan II 2024 yang tercatat sebesar 34,26% dari pagu belanja 2024. Berdasarkan realisasi tersebut, belanja APBD tumbuh sebesar -10,44% (yoy) pada periode laporan. Lebih lanjut, dari sisi nominal realisasi belanja APBD juga mengalami penurunan dari Rp13,94 triliun pada triwulan II 2024 menjadi Rp12,48 triliun pada triwulan II 2025. Penurunan belanja APBD didorong oleh penurunan realisasi pada seluruh komponen belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Realisasi belanja APBD di triwulan II 2025 masih ditopang oleh belanja operasi. Pada periode laporan, realisasi belanja operasi mencapai Rp9,45 triliun atau sebesar 33,08% terhadap pagu. Realisasi tersebut menurun dibandingkan triwulan II 2024 yang sebesar Rp10,29 triliun atau 36,24% dari total pagu. Belanja operasi berkontribusi sebesar 75,71% dari total realisasi belanja APBD pada periode laporan. Berdasarkan realisasi tersebut, belanja operasi tumbuh sebesar -8,18% (yoy) pada periode laporan.

Realisasi belanja modal menunjukkan penurunan kinerja. Realisasi belanja modal tercatat hanya sebesar Rp310,37 miliar pada triwulan II 2025 atau menurun sebesar -39,16% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp510,13 miliar. Di sisi lain, persentase realisasi terhadap pagu dari belanja modal juga menunjukkan penurunan yaitu dari 12,79% di triwulan II 2024 menjadi hanya 7,84% pada triwulan II 2025.

Realisasi belanja tidak terduga juga mengalami penurunan pada periode pelaporan. Belanja tidak terduga menurun secara persentase realisasi terhadap pagu yaitu dari 15,50% pada triwulan II 2024 menjadi 4,84% pada triwulan II 2025. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pagu dari Rp117,60 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp308,82 miliar pada tahun 2025. Berdasarkan realisasi tersebut, belanja tidak terduga turun sebesar 18,05% (yoy) atau secara nominal menurun dari Rp18,23 miliar di triwulan II 2024 menjadi Rp14,94 miliar pada triwulan II 2025.

Realisasi belanja transfer mengalami penurunan di triwulan II 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja transfer pada periode laporan mencapai Rp2,71 triliun atau 33,28% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut menurun sebesar -13,14% (yoy). Baik dari sisi nominal maupun persentase realisasi, belanja transfer mengalami penurunan dibandingkan triwulan II 2024 dengan realisasi mencapai Rp3,12 triliun atau 38,13% dari pagu anggaran.

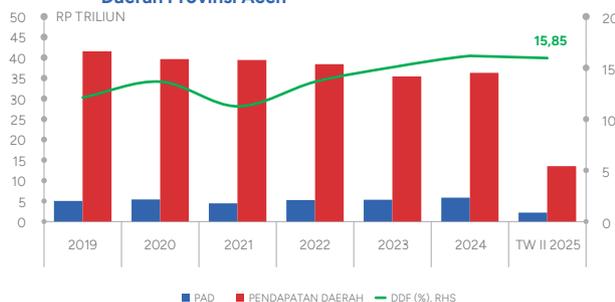
Tabel 2. 2. Realisasi Pendapatan APBD se-Aceh Triwulan II 2025

REALISASI PENDAPATAN APBD TRIWULAN II 2025	
Pendapatan Asli Daerah	32,43%
Pendapatan Transfer	34,03%
Lain-Lain	3,97%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi Pendapatan APBD secara nominal dan persentase pada triwulan II 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan II 2024. Realisasi pendapatan APBD pada triwulan II 2025 sebesar Rp13,20 triliun atau 32,93% dari pagu pendapatan APBD 2025, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2024 yang terealisasi sebesar Rp16,14 triliun atau 40,90% dari pagu pendapatan APBD 2024. Berdasarkan realisasi tersebut, pendapatan APBD tumbuh sebesar -18,20% (yoy) pada periode laporan.

Pendapatan transfer masih menjadi komponen utama pendapatan APBD. Berdasarkan porsi komponen pendapatan APBD, mayoritas berasal dari pendapatan transfer yang menyumbang 83,81% dari total realisasi pendapatan. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 85,30%. Pendapatan transfer mencatat realisasi sebesar Rp11,07 triliun atau 34,03% dari pagu pendapatan transfer 2025. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan capaian triwulan II 2024 dengan realisasi sebesar Rp13,77 triliun atau 41,73% dari pagu pendapatan transfer 2024. Realisasi tersebut membuat pendapatan transfer tumbuh sebesar -19,63% (yoy) pada periode laporan. Lebih lanjut, dana perimbangan memberikan realisasi terbesar pada komponen pendapatan APBD dengan realisasi mencapai Rp7,51 triliun, diikuti oleh dana desa sebesar Rp2,06 triliun dan dana otonomi khusus sebesar Rp1,47 triliun.

Grafik 2.1. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan penurunan. Pada triwulan II 2025, realisasi PAD mencapai Rp2,09 triliun atau 32,43% dari pagu PAD tahun 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 dengan realisasi mencapai Rp2,34 triliun atau 38,72% dari pagu PAD tahun 2024. Realisasi tersebut membuat PAD tumbuh sebesar -10,66% pada periode laporan. Realisasi PAD yang lebih rendah

didorong oleh menurunnya realisasi pajak daerah yang tumbuh sebesar -7,87% (yoy), atau menurun dari Rp1,08 triliun pada triwulan II 2024 menjadi Rp0,99 triliun pada triwulan II 2025. Kontribusi PAD mengalami perbaikan menjadi sebesar 15,85% dari total realisasi pendapatan APBD pada triwulan II 2025. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Aceh terhadap Transfer Pemerintah Pusat masih cukup tinggi. Namun demikian, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menunjukkan perbaikan pada periode 2019 s.d triwulan II 2025 (Grafik 2.1.).

2.3. Belanja dan Pendapatan Pemerintah Pusat

Realisasi belanja dan pendapatan APBN menurun di Provinsi Aceh. Belanja APBN di Provinsi Aceh pada periode laporan secara persentase mencatatkan realisasi sebesar Rp20,13 triliun (44,90% dari pagu anggaran) menurun dibanding triwulan II 2024 yang sebesar Rp23,45 triliun (45,10% dari pagu anggaran). Realisasi tersebut membuat belanja APBN tumbuh sebesar -14,16% (yoy) pada periode laporan. Di sisi lain, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp2,45 triliun (35,32% dari pagu anggaran), menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,06 triliun (42,80% dari pagu anggaran).

Tabel 2. 3. Realisasi Belanja APBN di Aceh Pada Triwulan II 2025

REALISASI BELANJA APBN TW-II 2025	
Belanja APBN	43,05%
Transfer ke Daerah	45,76%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Belanja Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar -26,70% (yoy) atau menurun dari Rp8,38 triliun menjadi Rp6,14 triliun. Walaupun demikian, dari sisi persentase realisasi belanja pemerintah pusat pada triwulan II 2025 mencapai 43,05%, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2024 sebesar 42,42%. Peningkatan persentase realisasi belanja pemerintah pusat utamanya didorong oleh penurunan pagu dari Rp19,75 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp14,27 triliun pada tahun 2025. Dari sisi nominal, belanja pemerintah pusat mengalami penurunan didorong oleh menurunnya realisasi belanja barang dan belanja modal. Belanja barang tumbuh -50,61% (yoy) atau menurun dari Rp2,81 triliun pada triwulan II 2024 menjadi Rp1,39 triliun pada triwulan II 2025. Penurunan juga terjadi pada belanja modal dengan pertumbuhan mencapai -76,53% (yoy) atau menurun dari Rp2,02 triliun menjadi Rp1,28 triliun pada periode laporan. Penurunan kedua komponen belanja pemerintah pusat tersebut akibat dinamika realokasi anggaran dan adanya pemilu pada tahun lalu. Adapun komponen belanja pemerintah pusat paling besar yaitu belanja pegawai dengan proporsi sebesar 72,01%. Nilai belanja pegawai pada triwulan II 2025 sebesar Rp4,42 triliun lebih tinggi dibanding triwulan II 2024 yang hanya sebesar Rp4,26 triliun atau tumbuh sebesar 3,83% (yoy). Sementara itu, komponen belanja pemerintah pusat lain yang juga mengalami peningkatan adalah belanja

bantuan sosial. Belanja bantuan sosial tumbuh sebesar 10,93% (yoy) atau meningkat dari Rp28,08 miliar menjadi Rp31,15 miliar pada periode laporan.

Belanja transfer ke daerah mengalami penurunan. Secara persentase, realisasi belanja transfer pada periode laporan tercatat sebesar 45,76% dari pagu 2025, lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 46,74%. Secara nominal, belanja transfer triwulan II 2025 mencapai Rp13,98 triliun, menurun sebesar -7,19% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang sebesar Rp15,07 triliun. Penurunan belanja transfer ke daerah terjadi di beberapa komponen yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana desa. Dana bagi hasil mencatat realisasi sebesar Rp337,66 miliar atau turun sebesar -5,52% (yoy). Sementara itu, realisasi dana alokasi umum sebesar Rp7,74 triliun atau turun sebesar -8,33% (yoy). Dana desa juga

mengalami penurunan dengan mencatat realisasi sebesar Rp2,59 triliun (-13,49% (yoy)). Di sisi lain, dana transfer khusus terutama dana alokasi khusus non fisik masih mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar Rp1,99 triliun atau tumbuh sebesar 8,70% (yoy).

Pendapatan APBN yang terdiri penerimaan perpajakan dan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mengalami penurunan. Pendapatan APBN pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp2,45 triliun, turun sebesar 35,32% (yoy). Penurunan utamanya bersumber dari menurunnya penerimaan pajak dengan realisasi mencapai Rp1,84 triliun atau turun sebesar -19,93% (yoy). Penurunan tersebut mayoritas disebabkan oleh peningkatan restitusi (pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak) pajak dan Penerimaan PPh. Sementara itu, realisasi kepabeanan dan cukai mencapai Rp261,31 miliar, terealisasi sebesar 91,05% dari pagu tahun 2025. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan ini tumbuh positif, didorong oleh kinerja signifikan dari sektor Bea Masuk 75,00% (yoy), Cukai 422,24% (yoy), dan Bea Keluar 602,27% (yoy) seiring dengan peningkatan kegiatan ekspor dan impor pada periode tersebut. Sementara itu, PNBPN juga mengalami penurunan yaitu sebesar -2,42% (yoy), yaitu dari Rp625,31 miliar pada triwulan II 2024 menjadi Rp610,16 miliar pada triwulan II 2025.

Tabel 2. 4. Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan IO 2025

REALISASI PENDAPATAN APBN TW-II 2025	
Pajak	29,71%
PNBP	81,82%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Tabel 2.5. Data Realisasi APBD Provinsi Aceh Triwulan II 2025

APBD PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tw II (Rp Miliar)		Realisasi Tw II (Rp Miliar)		Presentase Realisasi Tw II (%)		Pertumbuhan Realisasi Tw II 2024-2025
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
PENDAPATAN DAERAH	39.467,74	40.101,33	16.143,03	13.205,41	40,90	32,93	-18,20
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.051,32	6.455,15	2.343,25	2.093,56	38,72	32,43	-10,66
Pajak Daerah	2.511,35	2.716,15	1.079,62	994,66	42,99	36,62	-7,87
Retribusi Daerah	279,73	1.084,92	95,48	320,73	34,13	29,56	235,91
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	378,39	371,97	268,11	319,38	70,86	85,86	19,12
Lain-lain PAD yang Sah	2.881,85	2.282,11	900,04	458,79	31,23	20,10	-49,03
Pendapatan Transfer	32.999,30	32.519,68	13.769,37	11.067,13	41,73	34,03	-19,63
Lain-Lain Pendapatan Daerah	417,12	1.126,50	30,41	44,72	7,29	3,97	47,06
BELANJA DAERAH	40.681,48	40.973,91	13.939,21	12.484,42	34,26	30,47	-10,44
Belanja Operasi	28.404,58	28.573,49	10.294,59	9.452,19	36,24	33,08	-8,18
Belanja Modal	3.987,30	3.958,05	510,13	310,37	12,79	7,84	-39,16
Belanja Tidak Terduga	117,60	308,82	18,23	14,94	15,50	4,84	-18,05
Belanja Transfer	8.172,00	8.133,53	3.116,26	2.706,92	38,13	33,28	-13,14
SURPLUS/DEFISIT	-1.213,74	-872,58	2.203,82	720,99	-181,57	-82,63	-67,28

Sumber: DJPb, Kajian Fiskal Regional Agustus 2025

Tabel 2.6. Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan II 2025

BELANJA NEGARA (APBN) DI PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tw II (Rp Miliar)		Realisasi Tw II (Rp Miliar)		Presentase Realisasi Tw II (%)		Pertumbuhan Realisasi Tw II 2024-2025
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
PENDAPATAN NEGARA	7.149,07	6.936.89	3,059.75	2,449.84	42.80	35.32	-19.93
Penerimaan Perpajakan	6.405,72	6,191.14	2,434.44	1,839.68	38.00	29.71	-24.43
Penerimaan Pajak	6.035,11	5,904.14	2,300.19	1,578.37	38.11	26.73	-31.38
Kepabeanan dan Cukai	370,61	287.00	134.25	261.31	36.22	91.05	94.64
PNBP	743,35	745.75	625.31	610.16	84.12	81.82	-2.42
BELANJA NEGARA	51.985,97	44,827.81	23,446.48	20,126.38	45.10	44.90	-14.16
Belanja Pemerintah Pusat	19.752,03	14,266.83	8,379.44	6,142.03	42.42	43.05	-26.70
Belanja Pegawai	7.868,19	8,240.65	4,259.71	4,422.68	54.14	53.67	3.83
Belanja Barang	8.016,83	3,940.97	2,808.49	1,386.98	35.03	35.19	-50.61
Belanja Modal	3.806,08	2,020.05	1,283.16	301.22	33.71	14.91	-76.53
Belanja Bantuan Sosial	60,93	65.16	28.08	31.15	46.09	47.81	10.93
Transfer ke Daerah	32.233,94	30,560.98	15,067.04	13,984.35	46.74	45.76	-7.19
Dana Bagi Hasil	1.143,35	1,044.49	357.38	337.66	31.26	32.33	-5.52
Dana Alokasi Umum	15.901,78	15,332.50	8,447.44	7,744.06	53.12	50.51	-8.33
Dana Transfer Khusus	5.723,80	5,078.54	1,995.07	2,011.99	34.86	39.62	0.85
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.114,83	765.05	162.00	19.41	7.66	2.54	-88.02
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.608,96	4,313.49	1,833.07	1,992.58	50.79	46.19	8.70
Dana Otonomi Khusus	4.276,99	4,309.58	1,283.10	1,292.87	30.00	30.00	0.76
Dana Desa	4.958,90	4,738.17	2,969.64	2,568.94	59.89	54.22	-13.49
Dana Insentif Fiskal	229,12	57.70	14.41	28.83	6.29	49.97	100.07
SURPLUS/DEFISIT	-44.836,90	-37,890.92	-20,386.73	-17,676.54	45.47	46.65	-13.29

Sumber: DJPB, Kajian Fiskal Regional Agustus 2025

03.

Perkembangan Inflasi Daerah





Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 terjaga dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$ (yoy). IHK triwulan II 2025 mencatatkan inflasi sebesar 2,19% (yoy), naik dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 1,53% (yoy). Inflasi pada triwulan II 2025, terutama bersumber dari relatif tingginya andil pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.



3.1. Perkembangan Umum Inflasi

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1% (yoy). Inflasi Provinsi Aceh tercatat sebesar 2,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yaitu 1,53% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian inflasi Nasional 1,87% (yoy) (Grafik 3.1). Masih terkendalinya inflasi pada rentang sasaran target inflasi tahun 2025, tidak terlepas dari upaya yang dilakukan TPID se-Provinsi Aceh yaitu melalui sinergi dan kolaborasi intens dalam rangka pengendalian inflasi melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif).

Grafik 3.1. Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan II²⁰²⁵ (% , yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

3.2. Analisis Perkembangan Inflasi

Tekanan inflasi pada triwulan II 2025 utamanya dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini menjadi kelompok pengeluaran dengan andil inflasi tertinggi yaitu sebesar 0,74%. Andil inflasi tertinggi selanjutnya didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan

Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

KELOMPOK BARANG DAN JASA	TW I 2025		TW II 2025	
	INFLASI (%YOY)	ANDIL (%YOY)	INFLASI (%YOY)	ANDIL (%YOY)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,57	0,97	2,00	0,74
Pakaian dan Alas Kaki	0,78	0,05	1,15	0,07
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-2,69	-0,42	2,94	0,46
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,60	0,02	-0,13	-0,00
Kesehatan	1,54	0,03	1,95	0,03
Transportasi	0,90	0,09	0,60	0,06
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,89	-0,03	-0,65	-0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,06	0,01	1,15	0,01
Pendidikan	1,30	0,05	1,36	0,06
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,68	0,28	2,04	0,22
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8,90	0,48	10,16	0,56
INFLASI UMUM		1,53		2,19

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

jasa lainnya dengan andil 0,56%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,46%, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,22%. Sementara itu, laju inflasi lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,02%.

Jika dilihat berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan II 2025 diantaranya yaitu emas perhiasan, beras, tarif air minum PAM, Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan ikan dencis. Di sisi lain, laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh komoditas dengan andil deflasi tertinggi yaitu cabai merah, bawang merah, cabai rawit, bensin, dan cabai hijau.

Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Tabel 3.2. Inflasi Kel, Makanan, Minuman, dan Tembakau

INFLASI 2,00% (yoy)		ANDIL 0,74%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Beras	0,32	Cabai Merah	0,60
Sigaret Kretek Mesin	0,27	Bawang Merah	0,27
Ikan Dencis	0,24	Cabai Rawit	0,07
Ikan Tongkol	0,21	Cabai Hijau	0,05
Minyak Goreng	0,17	Telur Ayam Ras	0,05
Kelapa	0,11	Jeruk	0,04
Ikan Bandeng	0,08	Kentang	0,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi pada kelompok ini tercatat mengalami penurunan dari 2,57% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 2,00% (yoy) pada triwulan II 2025 (tabel 3.2). Berdasarkan subkelompoknya, tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau didorong oleh subkelompok rokok dan tembakau sebesar 6,93% (yoy).

Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi terbesar berada pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang berasal dari komoditas beras dan SKM. Komoditas beras mengalami peningkatan harga didorong oleh terbatasnya pasokan beras akibat baru masuknya musim tanam padi di Provinsi Aceh. Sementara itu, peningkatan harga SKM dipengaruhi oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 192/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Sehingga, Harga Jual Eceran (HJE) rokok mengalami penyesuaian berdasarkan jenis rokok yang diperdagangkan. Kenaikan tarif cukai juga turut berdampak terhadap berlanjutnya kenaikan harga komoditas rokok dan tembakau yang berlaku sejak 1 Januari 2025.

Inflasi juga didorong oleh komoditas perikanan di tengah penyelenggaraan Idul Adha. Komoditas perikanan diantaranya ikan dencis, ikan tongkol, dan ikan bandeng mengalami inflasi pada periode laporan. Ikan dencis mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,24%, sedangkan ikan tongkol mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,21%. Di sisi lain, ikan bandeng mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,08%. Inflasi pada komoditas perikanan tersebut disebabkan oleh keterbatasan pasokan akibat tidak melautnya nelayan saat periode HBKN Idul Adha.

Di sisi lain, terjaganya harga komoditas cabai merah dan bawang merah mampu menahan laju inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas cabai merah mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,60%, sedangkan bawang merah mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,27% pada triwulan laporan. Deflasi disebabkan oleh ketersediaan pasokan dari daerah penghasil sejalan berlangsungnya musim panen kedua komoditas tersebut pada periode laporan.

Kel. Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami peningkatan inflasi pada triwulan II 2025. Kelompok pakaian dan alas kaki tercatat mengalami inflasi sebesar 1,15% (yoy) dengan andil sebesar 0,07% pada triwulan II 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,78% (yoy). Peningkatan inflasi disumbang terutama oleh subkelompok alas kaki sebesar 1,15% (yoy) dan subkelompok pakaian sebesar 1,14% (yoy). Komoditas seragam sekolah anak dan baju muslim wanita memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%. Sementara itu, komoditas celana panjang jeans pria, blus wanita, dan T-shirt pria memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%. Peningkatan inflasi tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan dalam rangka menyambut tahun ajaran baru 2025/2026.

Tabel 3.3. Inflasi Kel, Pakaian dan Alas Kaki

INFLASI 1,15% (YOY)		ANDIL 0,05%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Seragam Sekolah Anak	0,02	Baju Anak Stelan	0,02
Baju Muslim Wanita	0,02	T-Shirt Anak	0,01
Celana Panjang Jeans Pria	0,01	Kemeja Panjang	0,01
Blus Wanita	0,01	Katun Pria	
T-Shirt Pria	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi pada periode laporan. Pada triwulan II 2025, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tercatat mengalami inflasi sebesar

2,94% (yoy). Tekanan inflasi bersumber dari subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya yang mengalami inflasi sebesar 27,02% (yoy) diikuti oleh subkelompok sewa dan kontrak rumah 1,45% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi ini sejalan dengan keputusan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2024 pada Juni 2024 untuk menaikkan tarif air minum PAM sebesar rata-rata 30%. Komoditas tarif air minum PAM memberikan andil inflasi sebesar 0,31%.

Tabel 3.4. Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar

INFLASI 2,94% (YOY)		ANDIL 0,46%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Tarif Air Minum PAM	0,31	Tidak Dipublikasi	
Kontrak Rumah	0,08	Tidak Dipublikasi	
Bahan Bakar RT	0,05	Tidak Dipublikasi	
Tukang Bukan Mandor	0,02	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Pada triwulan II 2025, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga mengalami deflasi. Deflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 0,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya 0,60% (yoy). Tekanan deflasi bersumber dari subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin dengan deflasi sebesar 1,43% (yoy).

Tabel 3.5. Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT

INFLASI -0,13% (YOY)		ANDIL -0,00%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Tidak Dipublikasi		Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Kesehatan

Laju inflasi kelompok kesehatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara tahunan, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,95% (yoy) dengan andil 0,03%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya sebesar 1,54% (yoy). Tekanan inflasi didorong oleh subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan dengan tingkat inflasi sebesar 2,91% (yoy). Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar yaitu vitamin, obat dengan resep, dan obat gosok dengan andil masing-masing sebesar 0,01%.

Tabel 3.6. Inflasi Kel. Kesehatan

INFLASI 1,95% (YOY)		ANDIL 0,03%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Vitamin	0,01	Tidak Dipublikasi	
Obat Dengan Resep	0,01	Tidak Dipublikasi	
Obat Gosok	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Transportasi

Inflasi pada kelompok transportasi lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Kelompok transportasi tercatat mengalami inflasi sebesar 0,60% (yoy) dengan andil sebesar 0,06%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,90% (yoy). Penurunan inflasi disebabkan oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Hal ini, sebagaimana Keputusan Menteri ESDM No 245.K/MG.01/MEM.M/2022 mengenai formulasi harga dasar atas perhitungan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disalurkan melalui SPBU, harga BBM Non-Subsidi per 1 Juni 2025 mengalami penurunan. Sementara itu, kebijakan diskon angkutan udara yang diterapkan pemerintah turut menyebabkan penurunan inflasi pada periode laporan.

Tekanan inflasi kelompok transportasi utamanya didorong oleh subkelompok pembelian kendaraan yang mengalami inflasi sebesar 5,88% (yoy). Sementara itu, komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar yaitu mobil dengan andil 0,09%, sepeda motor dan service dengan andil masing-masing sebesar 0,03%. Hal ini didorong oleh kebijakan opsen pajak baru mulai 5 Januari 2025. Pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Selain itu, kenaikan inflasi pada kelompok ini juga didorong oleh penyesuaian harga kendaraan di tengah perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% khususnya untuk kendaraan yang telah dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebelumnya.

Tabel 3.7. Inflasi Kel. Transportasi

INFLASI 0,60% (YOY)		ANDIL 0,06%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Mobil	0,09	Bensin	0,07
Motor	0,03	Angkutan Udara	0,03
Service	0,03		
Pemeliharaan Ringan	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, tercatat kembali mengalami deflasi pada periode triwulan II 2025. Kelompok ini tercatat mengalami deflasi sebesar 0,65% (yoy) dengan andil deflasi 0,02%, tidak sedalam triwulan

sebelumnya yang juga mengalami deflasi sebesar 0,89% (yoy). Deflasi bersumber dari subkelompok peralatan informasi dan komunikasi dengan deflasi sebesar 2,90% (yoy). Komoditas telepon seluler berkontribusi terhadap angka deflasi dengan andil 0,02%.

Tabel 3.8. Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

INFLASI -0,65% (YOY)		ANDIL -0,02%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Tidak Dipublikasi		Telepon Seluler	0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Pada triwulan II 2025, inflasi kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 1,15% (yoy) dengan andil 0,01%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,06% (yoy). Inflasi yang terjadi pada kelompok ini disebabkan oleh subkelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah yang tercatat mengalami inflasi sebesar 4,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,71% (yoy). Sementara itu, komoditas yang menjadi pendorong inflasi yaitu buku tulis bergaris dengan andil sebesar 0,02% dan tas sekolah dengan andil sebesar 0,01%.

Tabel 3.9. Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

INFLASI 1,15% (YOY)		ANDIL 0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Buku Tulis Bergaris	0,02	Mainan Anak	0,02
Tas Sekolah	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Pendidikan

Inflasi kelompok pendidikan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2025, kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 1,36% (yoy) dengan andil 0,06%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,30% (yoy). Inflasi pada kelompok pendidikan utamanya bersumber dari peningkatan biaya pendidikan yang terjadi tiap tahunnya. Komoditas yang menjadi pendorong inflasi yaitu perguruan tinggi dan sekolah dasar dengan andil masing-masing sebesar 0,02% serta taman kanak-kanak dan sekolah menengah pertama dengan andil masing-masing sebesar 0,01%.

Tabel 3.10. Inflasi Kel. Pendidikan

INFLASI 1,36% (YOY)		ANDIL 0,05%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Akademi/Perguruan Tinggi	0,02	Tidak Dipublikasi	
Uang Sekolah Dasar	0,02	Tidak Dipublikasi	
Taman Kanak-kanak	0,01	Tidak Dipublikasi	
SMP	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman /Restoran

Laju Inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 2,04% (yoy) dengan andil 0,22%, lebih rendah dari inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,68% (yoy). Pada triwulan II 2025 tekanan inflasi kelompok ini terutama didorong oleh subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang mengalami inflasi sebesar 2,04% (yoy). Sementara itu, komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini yaitu kopi siap saji dengan andil sebesar 0,06%, diikuti oleh komoditas nasi dengan lauk dengan andil sebesar 0,05%, serta bakso siap santap dan kue kering dengan andil masing-masing sebesar 0,02%.

Tabel 3.11. Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

INFLASI 2,04% (YOY)		ANDIL 0,22%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Kopi Siap Saji	0,07	Tidak Dipublikasi	
Nasi Dengan Lauk	0,05	Tidak Dipublikasi	
Bakso Siap Santap	0,02	Tidak Dipublikasi	
Kue Kering	0,02	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Pada triwulan pelaporan, inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat sebesar 10,16% (yoy) dengan andil sebesar 0,56% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,90% (yoy). Pendorong inflasi terutama berasal dari subkelompok perawatan pribadi lainnya dengan inflasi sebesar 24,14% (yoy).

Tabel 3.12. Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

INFLASI 10,16% (YOY)		ANDIL 0,56%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Emas Perhiasan	0,49	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Komoditas emas perhiasan menjadi pendorong utama inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Andil komoditas ini mencapai 0,49% pada periode pelaporan. Kenaikan harga emas perhiasan dorong oleh tren peningkatan harga emas global karena meningkatnya tekanan geopolitik di Timur Tengah dan ekspektasi pelaku pasar terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat untuk menurunkan suku bunga. Harga emas dunia di triwulan II 2025 berada pada level USD3.289/ounce, mengalami peningkatan sebesar 40,66% (yoy) (Grafik 3.3).

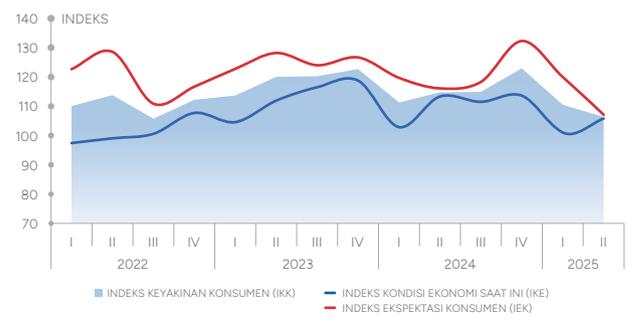
Grafik 3.2. Perkembangan Harga Emas Dunia



Sumber: Bloomberg, diolah

Laju inflasi triwulan II 2025 yang terkendali ditopang oleh terjaganya keyakinan dan ekspektasi masyarakat. Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang berada di batas atas level optimis (100). Pada triwulan II 2025, IKK tercatat sebesar 106,14 atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara, IEK tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 106,57. Di sisi lain, IKE lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 105,71 (Grafik 3.4).

Grafik 3.3. Perkembangan Survei Konsumen



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

3.3. Tracking Inflasi Triwulan III 2025

Pada triwulan III 2025, laju inflasi tahunan Provinsi Aceh diprakirakan meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh momen HBKN Maulid Nabi yang secara historis mendorong peningkatan permintaan terhadap komoditas pangan.

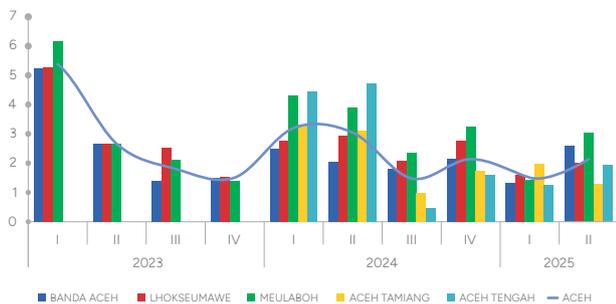
Di sisi lain, tekanan inflasi didorong oleh kelompok *Administered Price (AP)*. Hal ini sejalan dengan berakhirnya pemberian diskon tarif air PAM yang berdampak pada normalisasi harga komoditas tersebut. Sementara itu, pada kelompok *Core Inflation (CI)*, tekanan bersumber dari berlanjutnya tren peningkatan harga emas perhiasan, terutama dipicu oleh kenaikan harga emas dunia di tengah memanasnya konflik geopolitik dan ekonomi dunia. Lebih lanjut, terdapat potensi peningkatan harga CPO yang berdampak pada harga minyak goreng yang lebih tinggi.

Dalam merespons potensi tekanan inflasi pada triwulan III 2025, kolaborasi dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh perlu ditingkatkan guna menjaga capaian inflasi tetap berada pada sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Khususnya melalui program-program pengendalian inflasi *Volatile Food* melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

3.4. Inflasi Spasial

Tekanan inflasi pada triwulan II 2025 tercatat mengalami peningkatan hampir di seluruh Kabupaten/kota pantauan di Provinsi Aceh. Meulaboh mengalami inflasi tertinggi sebesar 3,07% (yoy), sementara inflasi tahunan terendah terjadi di Aceh Tamiang yaitu sebesar 1,33% (yoy). Sementara secara inflasi bulanan, Aceh Tamiang mengalami laju inflasi paling tinggi dengan inflasi sebesar 1,89% (mtm). Sedangkan Lhokseumawe mengalami inflasi paling rendah sebesar 1,15% (mtm).

Grafik 3.4. Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh (% yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Komoditas tarif air minum (PAM) tercatat sebagai penyumbang inflasi (yoy) tertinggi sebesar 0,84% di Kota Banda Aceh. Sementara, komoditas cabai merah menjadi penyumbang deflasi terbesar yang menahan inflasi dengan andil 0,39%.

Tabel 3.13 Andil Inflasi di Kota Banda Aceh (% yoy)

BANDA ACEH			
ANDIL INFLASI		ANDIL DEFLASI	
Tarif Air Minum PAM	0,84	Cabai Merah	0,39
Emas Perhiasan		Bawang Merah	0,12
Ikan Tongkol	0,35	Bensin	0,09
Ikan Dencis	0,25	Baju Anak Stelan	0,08
Mobil	0,23	Jeruk	0,06

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Selanjutnya, komoditas penyumbang inflasi (yoy) terbesar di Kota Lhokseumawe yaitu beras dengan andil sebesar 0,44%. Adapun laju inflasi tertahan oleh komoditas cabai merah yang mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,43%.

Tabel 3.14 Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% yoy)

LHOKSEUMAWE			
ANDIL INFLASI		ANDIL DEFLASI	
Beras	0,44	Cabai Merah	0,43
Emas Perhiasan	0,37	Bawang Merah	0,17
Kontrak Rumah	0,34	Jeruk	0,13
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,22	Daging Ayam Ras	0,11
Udang Basah	0,22	Cabai Rawit	0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tekanan inflasi di kota Meulaboh tertahan oleh komoditas cabai merah sebagai komoditas penyumbang deflasi terbesar (0,46%). Sementara, komoditas penyumbang inflasi terbesar tercatat beras dari komoditas emas perhiasan dengan andil sebesar 1,32%.

Tabel 3.15 Andil Inflasi di Kota Meulaboh (% yoy)

MEULABOH			
ANDIL INFLASI		ANDIL DEFLASI	
Emas Perhiasan	1,32	Cabai Merah	0,46
Beras	0,40	Bawang Merah	0,18
Sigaret Kretek Tangan	0,26	Popok Bayi Sekali Pakai	0,10
Sigaret Kretek Mesin	0,25	Jeruk Nipis	0,07
Minyak Goreng	0,20	Jeruk	0,07

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Di sisi lain, inflasi (yoy) di Aceh Tamiang didorong oleh komoditas beras dengan andil sebesar 0,55%. Kemudian inflasi ditahan oleh komoditas cabai merah yang mengalami deflasi dengan andil terbesar, yaitu 1,07%.

Tabel 3.16 Andil Inflasi di Aceh Tamiang (% yoy)

ACEH TAMIANG			
ANDIL INFLASI		ANDIL DEFLASI	
Beras	0,55	Cabai Merah	1,07
Ikan Dencis	0,42	Bawang Merah	0,36
Sigaret Kretek Mesin	0,41	Cabai Rawit	0,21
Minyak Goreng	0,25	Cabai Hijau	0,12
Ikan Bandeng	0,22	Telur Ayam Ras	0,12

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Terakhir, laju inflasi (yoy) di Aceh Tengah utamanya tertahan oleh komoditas cabai merah yang mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,41%. Di sisi lain, komoditas yang memberikan inflasi terbesar adalah komoditas sigaret kretek mesin (SKM) dengan andil inflasi sebesar 0,56%.

Tabel 3.17 Andil Inflasi di Aceh Tengah (% yoy)

ACEH TENGAH			
ANDIL INFLASI		ANDIL DEFLASI	
Sigaret Kretek Mesin	0,56	Cabai Merah	0,41
Ikan Tongkol	0,45	Bawang Merah	0,40
Beras	0,42	Bensin	0,08
Ikan Dencis	0,33	Tempe	0,07
Santan Segar	0,24	Cabai Hijau	0,06

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

3.5. Aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh

Pada triwulan II 2025, inflasi di Provinsi Aceh tetap terjaga meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dalam menjaga terkendalinya inflasi agar tetap berada pada sasaran $2,5\% \pm 1\%$, TPID Aceh menghadapi berbagai tantangan antara lain bersumber dari HBKN Idul Adha serta gejolak ekonomi dan geopolitik yang semakin memanas.

Oleh karena itu, KPw BI Provinsi Aceh bersama dengan TPID Provinsi Aceh mengambil langkah strategis untuk pengendalian inflasi yang efektif dan efisien. Dalam rangka menjalankan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), berbagai kegiatan telah dan akan dilakukan oleh TPID Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

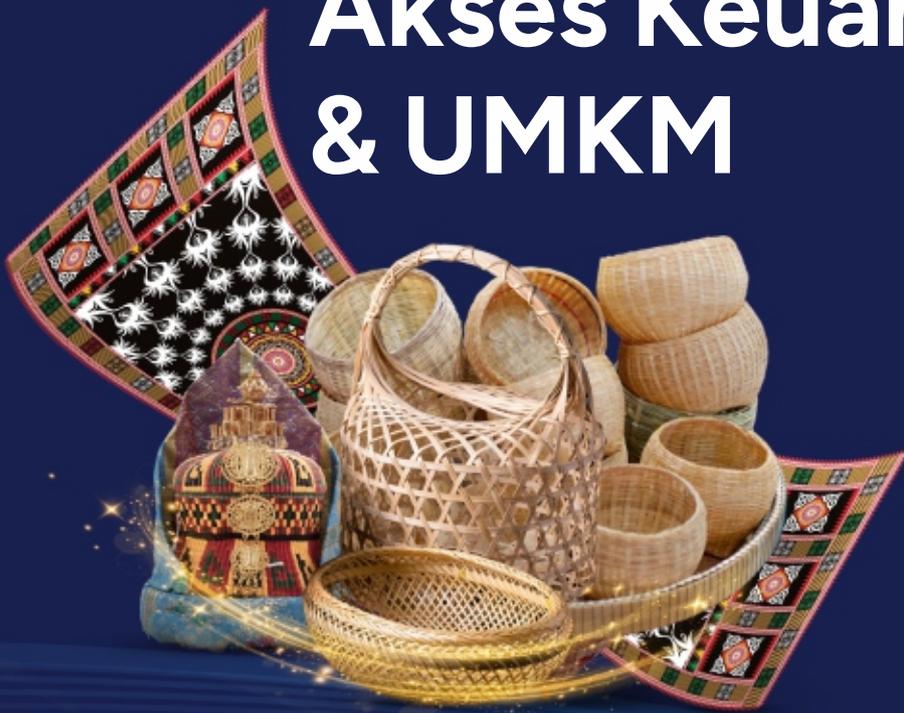
1. Keterjangkauan Harga
 - a. Pelaksanaan program sinergi operasi pasar murah melalui SPHP dan GPM utamanya di 5 (lima) kab/kota IHK di Provinsi Aceh.
 - b. Melakukan sidak pasar untuk memantau harga dan pasokan di pasar selama HBKN Ramadhan.

- c. Pemberian diskon pada tarif PAM di Kota Banda Aceh sebesar 30% untuk kelompok Rumah Tangga 1 dan sebesar 10% untuk Rumah Tangga 2.

2. Ketersediaan Pasokan
 - a. Mendorong program peningkatan produksi di daerah sentra a.l. melalui optimalisasi *Good Agriculture Practices*, replikasi *best practice*, dan hilirisasi pangan.
 - b. Mendorong *urban farming* dan pemanfaatan inovasi teknologi budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis.
 - c. Mendorong *contract farming* antara UMKM dan kelompok tani komoditas pangan strategis.
3. Kelancaran Distribusi
 - a. Pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan dalam rangka mendukung kelancaran distribusi komoditas pangan strategis dari daerah sentra ke non sentra dengan mempertimbangkan kebutuhan pasokan antar daerah.
 - b. Mengakselerasi program Kerja Sama antar Daerah (KAD) untuk komoditas pangan strategis, utamanya di 5 (lima) kabupaten/kota IHK di Provinsi Aceh dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan.
 - c. Memperkuat KAD daerah sentra dan non sentra serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi fasilitasi distribusi pangan antar daerah.
 - d. Pelaksanaan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk komoditas pangan yang bergejolak (*volatile food*).
4. Komunikasi Efektif
 - a. Melakukan pencatatan keluar/masuk barang terutama komoditas pangan strategis melalui optimalisasi jembatan timbang dalam rangka mengestimasi kecukupan pasokan komoditas pangan strategis di Provinsi Aceh.
 - b. Pelaksanaan *Capacity Building* kepada TPID se-Provinsi Aceh dengan tujuan *refreshment*, peningkatan pemahaman, serta penguatan sinergi antar TPID se-Provinsi Aceh dalam pengendalian inflasi.
 - c. Pelaksanaan *High Level Meeting* TPID Provinsi Aceh dan TPID Kabupaten/Kota IHK se-Provinsi Aceh dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi serta antisipasi risiko inflasi tahun 2025.
 - d. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan yang dihadiri TPID Provinsi Aceh dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
 - e. Pelaksanaan Rapat Evaluasi TPID tahun 2025 sebagai bentuk evaluasi kegiatan TPID selama tahun 2025 dan Langkah upaya yang akan dilakukan di tahun 2025.
 - f. Optimalisasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai *early warning system* inflasi.

04.

Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan & UMKM





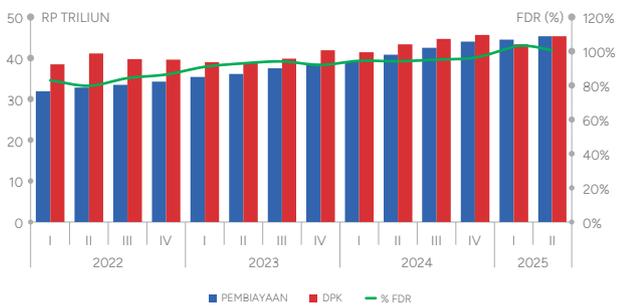
Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 tetap terjaga, tercermin dari rendahnya Non Performing Financing (NPF) di tengah kinerja pembiayaan yang tercatat tumbuh 10,37% (yoy). Lebih lanjut, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat sebesar 3,27% (yoy). Di sisi lain, rasio pembiayaan untuk UMKM tercatat sebesar 27,22%.



4.1. Kinerja Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan terpantau terjaga, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) diiringi dengan peningkatan kinerja penyaluran pembiayaan. Berdasarkan lokasi bank, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp44,77 triliun atau meningkat sebesar 3,27% (yoy). Sementara itu, penyaluran pembiayaan tercatat Rp45,04 triliun atau meningkat sebesar 10,37% (yoy). Dengan demikian, Financing Deposit Ratio (FDR) tercatat 100,60% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 102,67% (Grafik 4.1). Penurunan FDR ini menunjukkan pertumbuhan DPK relatif lebih tinggi dibandingkan pembiayaan pada periode triwulanan, meskipun secara tahunan pembiayaan tumbuh lebih pesat daripada DPK.

Grafik 4.1. Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokBank)

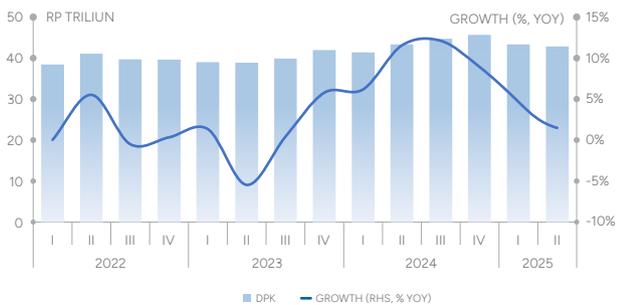


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Stabilitas Sistem Keuangan pada triwulan II 2025 menunjukkan kondisi yang terjaga. Secara agregat, risiko pembiayaan di Provinsi Aceh masih terjaga dalam batas aman yang tercermin dari NPF sebesar 2,06% meskipun terdapat sedikit mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya.

Kinerja penghimpunan DPK terpantau mengalami peningkatan. Pada triwulan II 2025, nominal DPK mencapai Rp44,77 triliun, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dengan nominal Rp43,33 triliun dengan pertumbuhan DPK sebesar 3,27% (yoy). Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada DPK pemerintah dan perseorangan masing-masing sebesar 7,21% (yoy) dan 3,53% (yoy), lebih tinggi jika

Grafik 4.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga

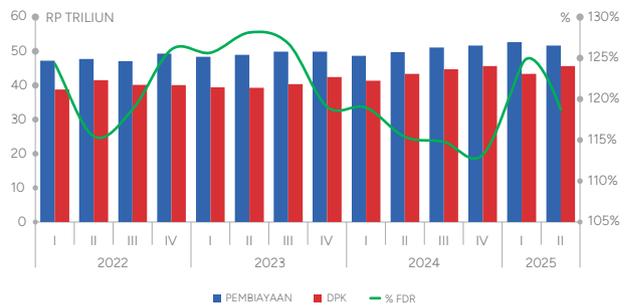


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang mengalami kontraksi pada DPK pemerintah dan korporasi. DPK korporasi tercatat mengalami kontraksi sebesar 5,96% (yoy), atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 10,33% (yoy).

Berdasarkan lokasi proyek, penyaluran pembiayaan mengalami penurunan. Penyaluran pembiayaan di Aceh berdasarkan lokasi proyek pada triwulan II 2025 sebesar Rp51,87 triliun tumbuh sebesar 4,25% (yoy), atau melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, FDR berdasarkan lokasi proyek tercatat sebesar 116,81% lebih rendah dari triwulan sebelumnya 121,47% (Grafik 4.3).

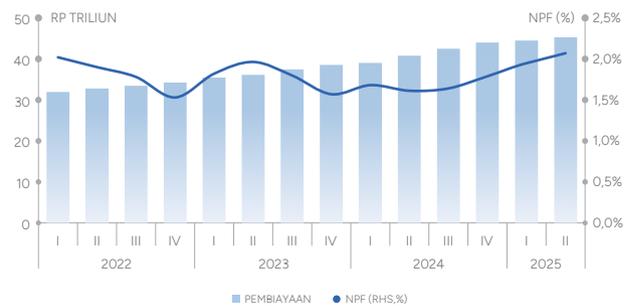
Grafik 4.3 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokPro)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, Non Performing Financing (NPF) berdasarkan lokasi bank masih pada rentang aman. NPF pada triwulan II 2025 mencapai 2,06%, sedikit lebih tinggi dibanding triwulan I 2025 yang sebesar 1,95% (Grafik 4.4.), namun masih berada di bawah *threshold* 5%.

Grafik 4.4. Perkembangan Non Performing Financing (LokBank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Penyaluran pembiayaan masih tumbuh tinggi namun pertumbuhannya melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan pembiayaan berdasarkan lokasi bank menunjukkan nilai 10,37% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,89% (yoy).

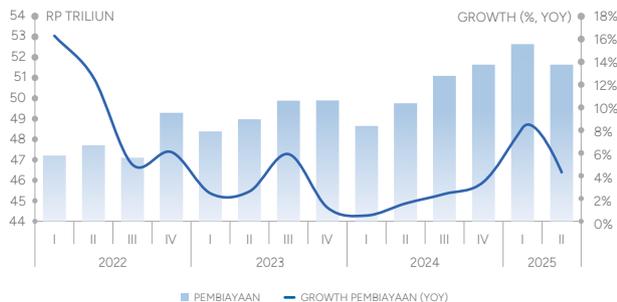
Grafik 4. 5. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (LokBank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Selain itu, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan dari luar Aceh juga menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp51,87 triliun, atau tumbuh pada tingkat 4,25% (yoy). Penyaluran pembiayaan tersebut menurun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp52,64 triliun. Namun, secara nominal penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan nominal pembiayaan berdasarkan lokasi bank. Hal mengindikasikan bahwa pembiayaan di Aceh masih mengandalkan sumber dana dari perbankan di luar Aceh.

Grafik 4. 6. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (LokPro)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

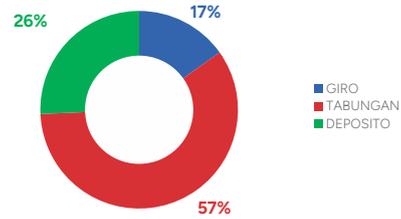
4.2. Intermediasi Perbankan

4.2.1. DPK Menurut Jenisnya

Tabungan masih mendominasi komposisi DPK di Aceh. Pada triwulan II 2025, DPK di Aceh didominasi tabungan dengan proporsi sebesar 57%, diikuti deposito sebesar 26% dan giro sebesar 17%. Secara nominal, total DPK pada triwulan II 2025 adalah sebesar Rp44,77 triliun, yang terdiri dari tabungan Rp25,51 triliun, deposito sebesar Rp11,85 triliun, dan giro Rp7,41 triliun.

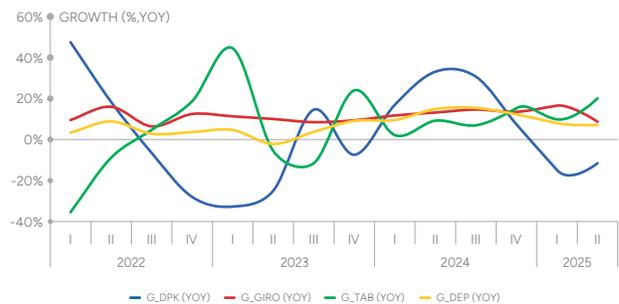
Pada triwulan laporan, jenis DPK yang mengalami pertumbuhan yaitu tabungan dan deposito. Pada triwulan II 2025, tabungan dan deposito merupakan jenis DPK yang masih mengalami pertumbuhan positif yaitu masing-masing sebesar 4,79% (yoy) dan 16,25% (yoy). Sementara,

Grafik 4. 7. Proporsi DPK per Jenis (LokBank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4. 8. Perkembangan DPK Berdasarkan Jenis



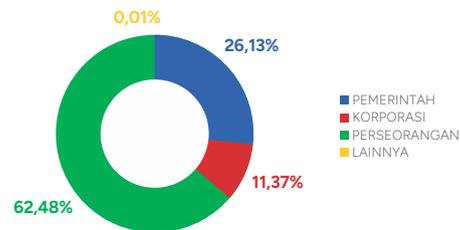
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

giro merupakan komponen DPK yang mengalami kontraksi yaitu sebesar 15,91% (yoy) sedikit membaik jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 17,11% (yoy).

4.2.2. DPK Menurut Kepemilikan

Berdasarkan kepemilikannya, DPK di Aceh masih didominasi oleh kepemilikan perseorangan. DPK milik perseorangan memiliki porsi terbesar yaitu 62,48%. Sementara, DPK milik pemerintah dan korporasi masing-masing memiliki porsi sebesar 26,14% dan 11,37%.

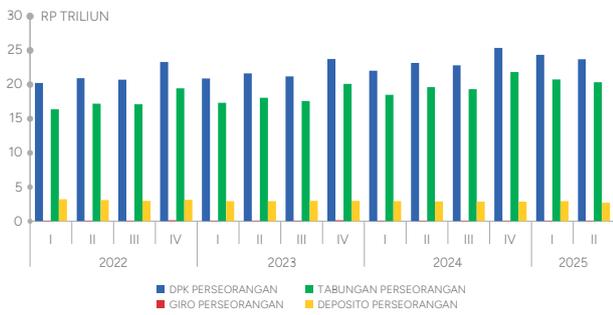
Grafik 4. 9. Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK perseorangan pada triwulan laporan terdiri dari tabungan memiliki porsi sebesar 86,55%, deposito memiliki porsi sebesar 13,14%, dan giro memiliki porsi sebesar 0,30%. Secara pertumbuhan, DPK perseorangan dalam bentuk tabungan dan giro mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,40% (yoy) dan 19,51% (yoy). Sementara itu deposito mengalami kontraksi sebesar 2,09% (yoy).

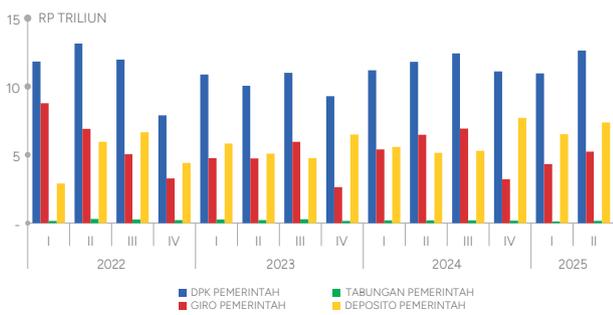
Grafik 4.10. Perkembangan DPK Perseorangan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, pertumbuhan DPK pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 7,21% (yoy). Pertumbuhan DPK pemerintah disebabkan oleh pertumbuhan deposito pemerintah yang mengalami pertumbuhan sebesar 41,03% (yoy). Sedangkan giro pemerintah dan tabungan pemerintah mengalami kontraksi masing-masing sebesar 18,37% (yoy) dan 34,08% (yoy) meskipun tidak sedalam pada triwulan sebelumnya.

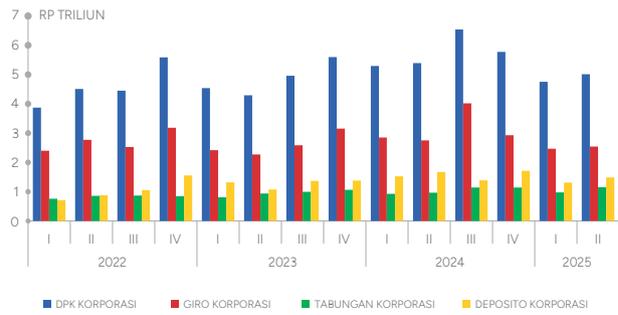
Grafik 4.11. Perkembangan DPK Pemerintah



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK korporasi masih didominasi oleh giro. Proporsi DPK korporasi pada triwulan laporan terdiri dari giro sebesar 47,99%, deposito sebesar 28,87%, dan tabungan sebesar 23,14%. Meskipun DPK korporasi jenis giro mendominasi, namun jenis giro mengalami kontraksi sebesar 11,49% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 13,41% (yoy). Begitu juga dengan deposito korporasi yang mengalami kontraksi sebesar 12,73% (yoy). Sedangkan DPK jenis tabungan mengalami pertumbuhan sebesar 21,52% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,93% (yoy).

Grafik 4.12. Perkembangan DPK Korporasi

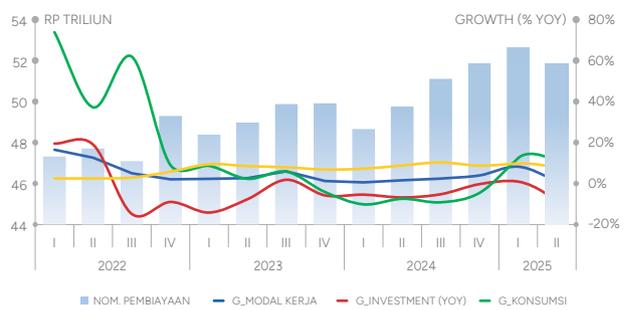


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.3. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan II 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,25% (yoy), yang masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan sektor produktif perlu untuk terus didorong, utamanya untuk lapangan usaha atau sektor prioritas agar dapat memberikan efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Pertumbuhan pembiayaan di triwulan laporan didorong oleh jenis pembiayaan konsumsi dan investasi yaitu masing-masing sebesar 9,73% (yoy) dan 8,35% (yoy). Sedangkan pembiayaan modal kerja yang mengalami kontraksi sebesar 12,40%.

Grafik 4.13. Perkembangan Pembiayaan (Lokpro)



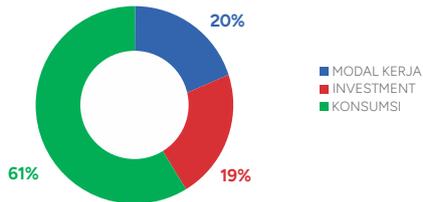
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Nilai pembiayaan yang bersifat konsumtif memiliki proporsi sebesar 61,00%, sementara penyaluran pembiayaan di sektor produktif memiliki proporsi sebesar 39,00%. Adapun pembiayaan dari sektor produktif dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja, masing-masing memiliki porsi sebesar 19,00% dan 20,00% dari total pembiayaan pada triwulan laporan.

Peningkatan pembiayaan konsumsi sejalan dengan optimisme konsumen yang masih berada pada zona optimis. Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada zona optimis hingga bulan Juni 2025. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Juni

2025 tercatat sebesar 106,14 meskipun lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 110,52 namun masih terjaga optimis didukung Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang juga optimis yakni sebesar 106,58.

Grafik 4.14. Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan

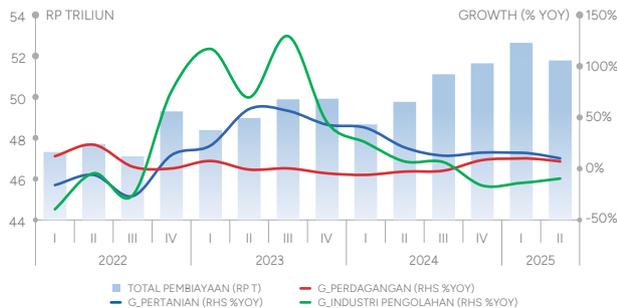


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.4. Pembiayaan Menurut Lapangan Usaha (LU)

Pangsa pembiayaan terbesar menurut lapangan usaha didominasi oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran. Pada triwulan II 2025, porsi pembiayaan terhadap LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat 12,63%. Kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,73% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 10,02% (yoy). Sementara itu, LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan memiliki porsi pembiayaan masing-masing sebesar 9,18% dan 7,65%. Pada triwulan II 2025, kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU Pertanian tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,56% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 15,53% (yoy). Sedangkan LU Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 11,10% (yoy) namun tidak sedalam pada triwulan sebelumnya yang sebesar 13,91% (yoy).

Grafik 4.15. Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha



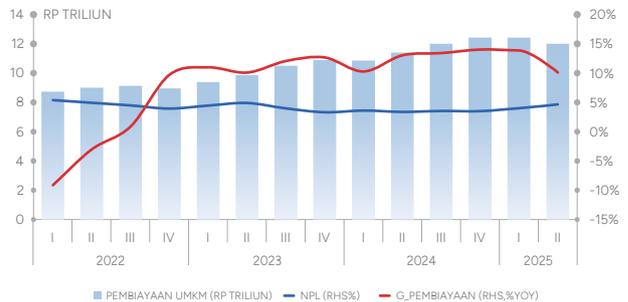
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.5. Pembiayaan UMKM

Kinerja pembiayaan UMKM pada triwulan II 2025 masih tumbuh. Kinerja pembiayaan yang disalurkan kepada sektor UMKM di Aceh tercatat tumbuh sebesar 10,37% (yoy)

melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,87% (yoy). Secara nominal, pembiayaan UMKM pada triwulan II juga mengalami penurunan yakni sebesar Rp12,25 triliun, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar Rp12,43 triliun. Sementara itu, rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan di Aceh pada triwulan II 2025 sebesar 27,22%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan inklusi pembiayaan di Aceh.

Grafik 4.16. Perkembangan Pembiayaan UMKM



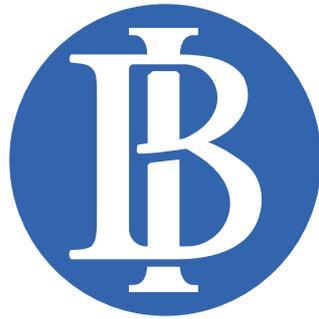
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Bank Indonesia terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan UMKM. Hal ini dilakukan dengan menetapkan target proporsi pembiayaan UMKM perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.24/3/PBI/2022. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan kinerja pembiayaan/kredit UMKM melalui penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan Loan to Funding Ratio sebagaimana diatur dalam PBI No. 24/4/PBI/2022. Sementara itu, di tingkat regional Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan di seluruh wilayah Indonesia juga turut mendorong kinerja UMKM melalui berbagai program pendampingan.

4.3. Strategi dalam Mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM di Aceh

Kpw BI Provinsi Aceh melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. KPw BI Provinsi Aceh secara konsisten terus mendorong peningkatan akses keuangan UMKM untuk mendukung optimalisasi pembiayaan di daerah dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM diantaranya melalui program pengembangan UMKM seperti pendampingan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan melalui optimalisasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) dan survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID). KPw BI Provinsi Aceh turut melakukan fasilitasi UMKM pada perluasan akses pasar maupun promosi perdagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri melalui program-program seperti Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Industri Kreatif Syariah (IKRA).

Di samping itu, KPw BI Provinsi Aceh menyelenggarakan program pengembangan kapasitas wirausaha melalui Program Pengembangan Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI). Program yang diadakan tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kinerja wirausaha di Provinsi Aceh sehingga dapat naik kelas, terutama bagi wirausaha yang mendukung program pengendalian inflasi. Di samping itu, program WUBI ditujukan untuk mendorong ekspor atau substitusi impor, pariwisata, serta mendukung ekonomi dan keuangan syariah, dan mengembangkan produk dan jasa unggulan daerah. Lebih lanjut, melalui program WUBI dapat menciptakan ekosistem wirausaha di Provinsi Aceh yang mendukung upaya percepatan pengembangan usaha sehingga memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan perekonomian daerah. WUBI kembali hadir di tahun 2025 dengan mengedepankan sinergi bersama Pemerintah Aceh dan Dekranasda Provinsi Aceh. Dengan partisipasi pendaftaran sebanyak 298 UMKM, akan dilakukan kurasi lanjutan untuk menemukan UMKM unggulan dalam menerima program lanjutan.



05.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah





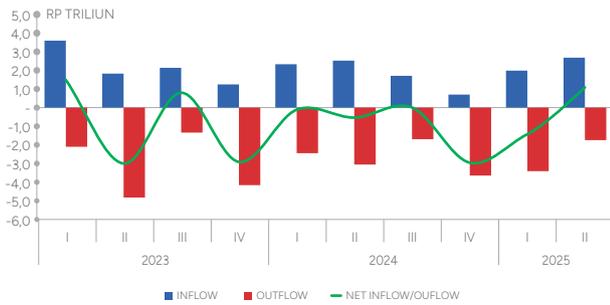
Pada triwulan II 2025, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi net inflow pada triwulan laporan. Sementara, metode pembayaran non tunai seperti, penggunaan kartu debit, uang elektronik, dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.



5.1. Sistem Pembayaran Tunai

Pengedaran uang kartal mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat pada triwulan II 2025. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengalami *net inflow* sebesar Rp1,1 triliun dengan komposisi total uang kartal masuk (*inflow*) sebesar Rp2,8 triliun dan total uang kartal keluar (*outflow*) sebesar Rp1,7 triliun (Grafik 5.1). *Net inflow* pada triwulan laporan mengindikasikan bahwa peredaran uang kartal di masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan setoran kembali ke Bank Indonesia, sehingga kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh terhadap uang kartal pada triwulan II 2025 relatif rendah.

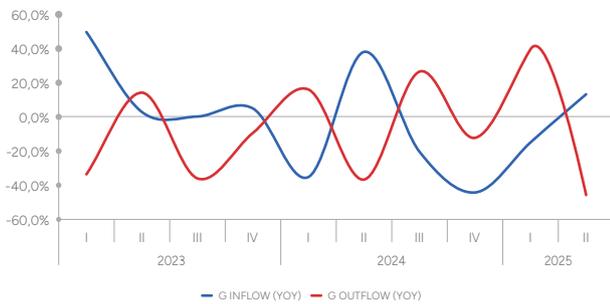
Grafik 5.1. Netflow Kas (Rp Triliun)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara tahunan, tingkat *outflow* pada triwulan II 2025 berkontraksi sebesar 45,7% (yoy) sedangkan *inflow* tumbuh sebesar 11,5% (yoy) (Grafik 5.2). Secara keseluruhan, peredaran uang kartal mengalami penurunan karena adanya pelambatan kinerja konsumsi rumah tangga.

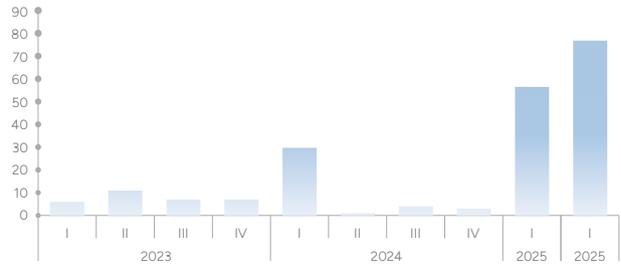
Grafik 5.2. Pertumbuhan Inflow dan Outflow (% yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Temuan uang yang diragukan keasliannya pada triwulan laporan mengalami kenaikan. Daerah dengan temuan uang yang diragukan keasliannya, yakni daerah Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Tamiang. Kenaikan ini terjadi seiring meningkatnya peredaran uang pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Temuan tersebut berasal dari kepolisian, penukaran masyarakat, dan penukaran perbankan (Grafik 5.3).

Grafik 5.3. Temuan Uang Palsu (Lembar)



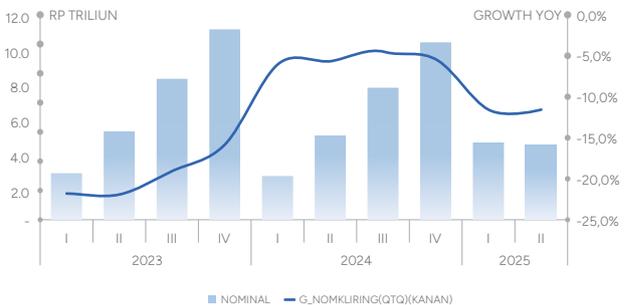
Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

Perkembangan pembayaran non tunai, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri, terus menunjukkan tren positif. Sejalan dengan perkembangan digitalisasi di provinsi Aceh, preferensi masyarakat Aceh dalam melakukan transaksi secara non tunai turut mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari meningkatnya pembayaran menggunakan instrumen APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, instrumen Uang Elektronik (UE) baik *server based* ataupun *chip based* di Provinsi Aceh. Tren penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) juga bergerak positif diiringi dengan penurunan tren pembayaran melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) ritel.

Transaksi sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui SKNBI pada triwulan II 2025 tumbuh 95,6% (qto) dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan turun sebesar 11,9% (yoy) atau sebesar Rp4,5 triliun dari Rp5,1 triliun pada triwulan II 2024 (Grafik 5.4).

Grafik 5.4. Perkembangan Nominal SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

1. Aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*inflow*) lebih kecil dari aliran uang kartal dari Bank Indonesia ke sistem perbankan dan masyarakat (*outflow*)

Volume transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan tumbuh 97,7% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan tercatat sebanyak 83.952 transaksi atau terkontraksi sebesar 12,7% (yoy) dari 96.118 transaksi pada triwulan II 2024 (Grafik 5.5).

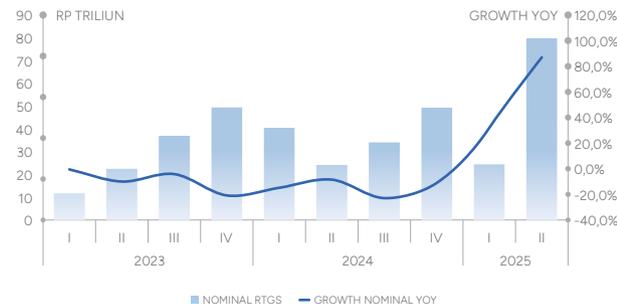
Grafik 5.5. Perkembangan Volume SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan sistem pembayaran nilai besar dalam Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS) secara nominal tercatat meningkat pada triwulan laporan. Transaksi BI-RTGS secara nominal tercatat sebesar Rp80,2 triliun atau naik sebesar 240,2% (yoy) dari Rp23,6 triliun pada triwulan II 2024. Secara triwulanan (qtq), nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan meningkat sebesar 240,2% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 5.6).

Grafik 5.6. Perkembangan Nominal BI-RTGS

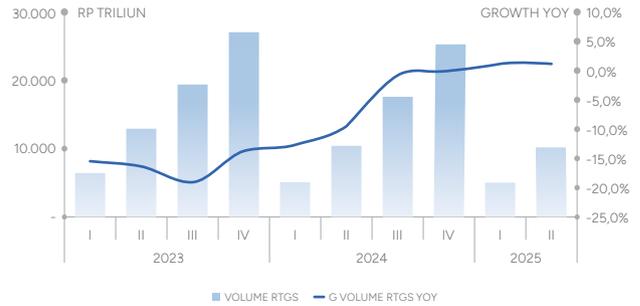


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Namun demikian, jika dilihat secara volume, transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan naik 97,7% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Volume transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebanyak 10.310 transaksi atau terkontraksi sebesar 6,1% (yoy) dari 10.979 transaksi pada triwulan II 2024 (Grafik 5.7).

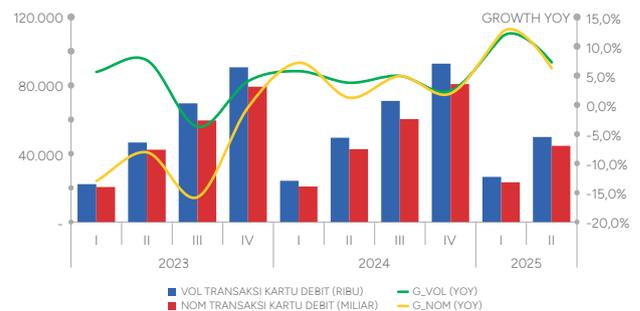
Selanjutnya, transaksi menggunakan kartu ATM debit mengalami pertumbuhan pada triwulan laporan. Volume transaksi pada triwulan laporan tercatat naik sebesar 7,1% (yoy) menjadi 50 juta transaksi. Sementara nominal transaksi kartu ATM debit tercatat sebesar Rp43,6 triliun atau tumbuh sebesar 5,8% (yoy) (Grafik 5.8).

Grafik 5.7. Perkembangan Volume BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

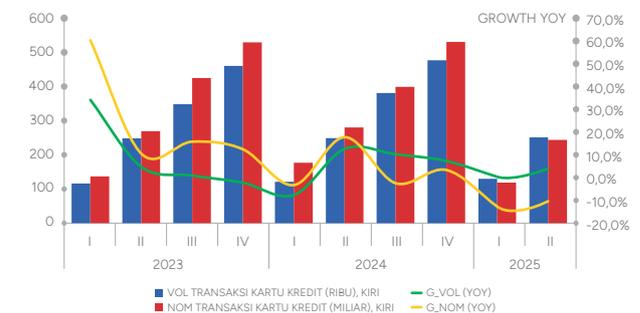
Grafik 5.8. Transaksi ATM Debit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, dari sisi kartu kredit juga mengalami pertumbuhan pada triwulan laporan. Volume transaksi naik sebesar 3,1% (yoy) atau menjadi sebesar 256 ribu transaksi (Grafik 5.9). Secara nominal, pada triwulan laporan transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp252 miliar atau terkontraksi sebesar 9,7% (yoy). Selama triwulan II 2025, transaksi kartu kredit mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan nominal mencapai Rp242 miliar atau 96,4% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 247.901 transaksi atau 96,5% dari total volume transaksi.

Grafik 5.9. Transaksi Kartu Kredit



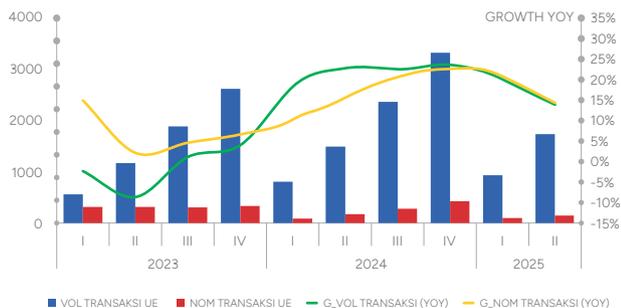
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran non tunai, perkembangan transaksi menggunakan UE terus mengalami peningkatan. Transaksi UE secara nominal pada triwulan II 2025 mencapai Rp1.867 miliar atau naik sebesar 14,5% (yoy). Sementara volume transaksi UE naik sebesar 14,2% (yoy) atau sebanyak 15 juta transaksi selama triwulan II 2025 (Grafik 5.10). Tren transaksi UE yang terus meningkat mengindikasikan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan UE baik dari sisi konsumen maupun merchant.

Implementasi berbagai program elektronifikasi oleh Pemda juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi UE. Meningkatnya minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan UE juga diiringi dengan peningkatan infrastruktur penerima pembayaran UE baik chip based ataupun server based. Peningkatan ini juga selaras dengan semakin tingginya intensitas penggunaan UE dalam aktivitas belanja masyarakat melalui platform e-commerce. Selama triwulan II 2025, transaksi UE mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan jumlah nominal mencapai Rp1.276 miliar atau 68,3% dari total nominal transaksi dengan volume sebanyak 12,4 juta transaksi atau 82,9% dari total volume transaksi.

Implementasi QRIS menjadi pendorong meningkatnya transaksi UE berbasis server (server based) di Provinsi Aceh. Pemanfaatan salah satu metode pembayaran digital berbasis server yaitu melalui QRIS mengalami peningkatan yang tercermin dari perkembangan volume dan nominal transaksinya. Peningkatan ini didorong oleh *awareness* masyarakat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan fitur pembayaran yang bersifat *contactless*. Hal ini juga mengindikasikan bahwa demand masyarakat untuk melakukan *contactless payment* semakin tinggi.

Grafik 5.10. Perkembangan Transaksi UE

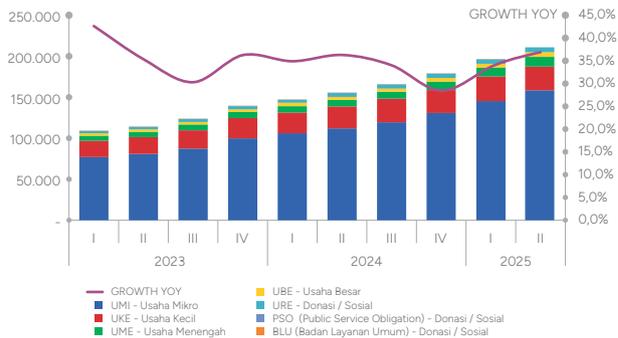


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Peningkatan transaksi QRIS didukung oleh terus meningkatnya jumlah merchant. Hingga triwulan II 2025, terdapat 213.516 merchant yang telah mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran non tunai (Grafik 5.11). Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 37,6% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang

sama tahun sebelumnya sebesar 155.211 merchant. Secara triwulanan, jumlah merchant meningkat sebesar 8,7% (qtq) dari posisi triwulan sebelumnya sebanyak 196.415 merchant. Berdasarkan klasifikasi usaha yang telah mengimplementasikan QRIS, *share* terbesar dimiliki oleh usaha mikro (UMI) sebanyak 159.978 merchant (74,9%).

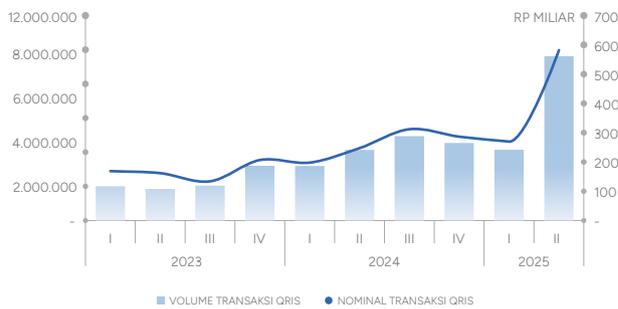
Grafik 5.11. Pertumbuhan Merchant QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara dari sisi jumlah pengguna, hingga triwulan II 2025 telah terdapat 681.674 pengguna atau bertambah sebanyak 13.095 selama triwulan laporan. Dari sisi volume transaksi, pada triwulan II 2025 terdapat 9,7 juta transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp1.146 miliar (Grafik 5.12).

Grafik 5.12. Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

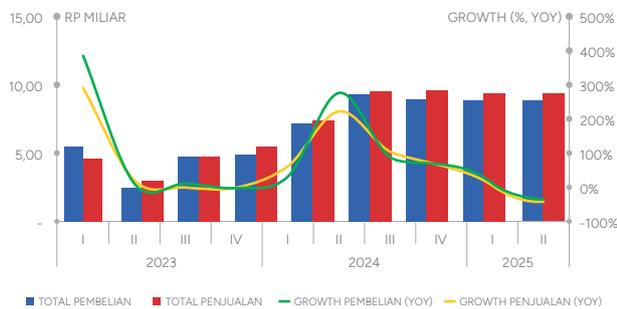
Dalam rangka mewujudkan nilai tukar yang stabil, Bank Indonesia juga berperan sebagai regulator Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di daerah.

Hingga triwulan II 2025, terdapat 13 (tiga belas) KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh yang melayani pembelian maupun penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Sebanyak 5 (lima) KUPVA BB beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sementara 8 (delapan) lainnya beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Pada triwulan II 2025, transaksi KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh mengalami kontraksi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan menurun sebesar 16,15% (yoy) menjadi Rp15,81 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp18,85 miliar.

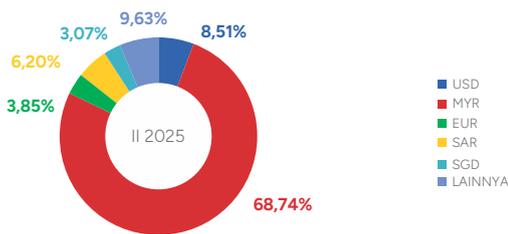
Berdasarkan jenis transaksi, pembelian UKA pada triwulan laporan menunjukkan adanya penurunan. Pembelian UKA di Aceh pada triwulan II 2025 berkontraksi sebesar 13,32% (yoy) menjadi Rp8,09 miliar dari Rp9,32 miliar pada triwulan II 2024. Begitu pula dengan penjualan UKA pada triwulan laporan yang mengalami kontraksi sebesar 19,02% (yoy) dari Rp9,53 miliar pada triwulan II 2024 menjadi Rp7,72 miliar (Grafik 5.13).

Grafik 5.13. Transaksi KUPVA BB



Sumber: LKPBU, diolah

Grafik 5.14. Disagregasi Transaksi UKA



Sumber: LKPBU, diolah

Berdasarkan jenis UKA yang diperdagangkan, transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan didominasi oleh UKA Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 68,74% dan Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar 8,51% (Grafik 5.14). Dominasi UKA tersebut tidak terlepas dari faktor ekspor impor, pariwisata, pendidikan, dan remitansi TKA yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran terhadap UKA di Provinsi Aceh.

5.4. Penyaluran Program Sembako dan PKH

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016

tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Sesuai instruksi Kementerian Sosial Republik Indonesia, penyaluran secara tunai dilakukan oleh PT Pos Indonesia, sedangkan penyaluran secara non tunai dilakukan oleh Himbara - BSI. Jenis bantuan sosial yang disalurkan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang juga dikenal dengan Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan oleh KPM dalam menerima bantuan sosial. Dengan demikian, KPM yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal telah berubah statusnya menjadi *bankable*.

Dalam rangka mendukung kesuksesan perluasan implementasi penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), Bank Indonesia juga senantiasa melakukan sosialisasi dan monitoring perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai di Aceh. Adapun kegiatan *monitoring* dilaksanakan melalui pemantauan data secara *off site* maupun *on site* terhadap efektivitas/keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan dalam penyaluran BSNT.

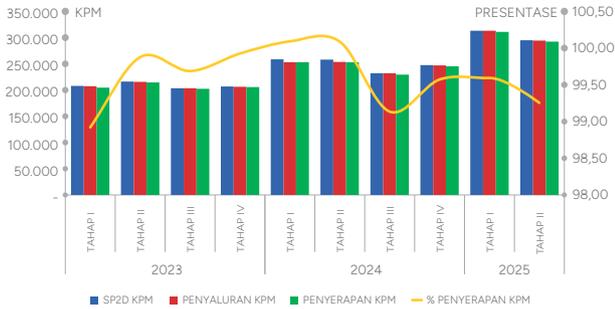
PKH disalurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di masa pandemi. Pada triwulan laporan, bantuan PKH Tahap II tahun 2025 di Provinsi Aceh telah disalurkan sebesar 100% kepada KPM (Grafik 5.15). Jumlah KPM yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap II tercatat sebanyak 294.121 atau telah mencapai 99,07% dari target jumlah penerima sebanyak 296.887 KPM. Berbeda dengan penyaluran Tahun I tahun 2025 dimana masih terdapat Kota/Kab yang penyalurannya dilakukan hanya secara tunai, PKH Tahap II telah seluruhnya dilakukan secara non tunai oleh Himbara-BSI di 512 Kab/Kota di seluruh Indonesia.

Dari aspek nominal, besaran bantuan yang disalurkan pada setiap tahap mengalami fluktuasi seiring dengan penyesuaian terhadap data KPM yang diperbarui secara berkala oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada Tahap II tahun 2025, nominal bantuan yang disalurkan mencapai sebesar Rp217,72 miliar dengan tingkat penyaluran PKH yang telah mencapai 100% (Grafik 5.16). Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahap II tahun 2024, yaitu sebesar Rp186,05 miliar.

Pada Tahap II 2025, nominal bantuan yang disalurkan Program Sembako sebesar Rp101 miliar dengan persentase nominal penyaluran Program Sembako telah mencapai 100% (Grafik 5.17). Jumlah tersebut naik dibandingkan Tahap II 2024 sebesar Rp97 miliar. Program Sembako Tahap II telah seluruhnya dilakukan secara non tunai oleh Himbara-BSI di 514 Kab/Kota di seluruh Indonesia.

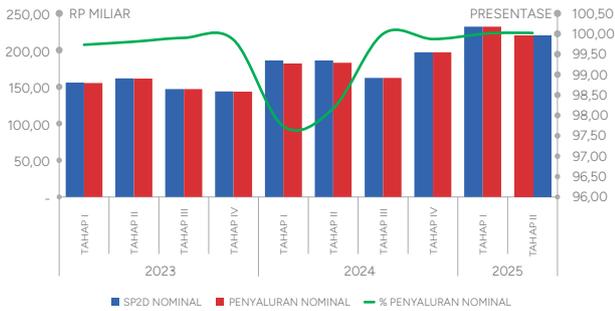
Sementara itu, jumlah KPM Program Sembako yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap II naik menjadi 498.601 KPM atau telah mencapai 98,57% dari target jumlah penerima

Grafik 5.15. Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)



Sumber: Himbara, diolah

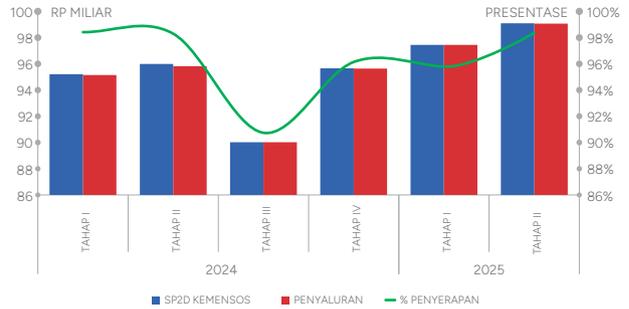
Grafik 5.16. Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

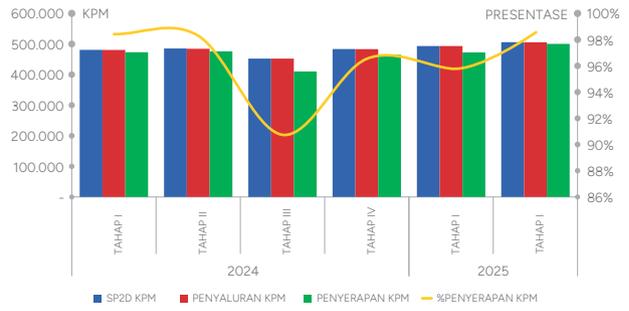
sebanyak 505.865 KPM (Grafik 5.18). Kenaikan penyaluran didukung oleh peningkatan efektivitas proses penyaluran oleh BSI.

Grafik 5.17. Perkembangan Program Sembako (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

Grafik 5.18. Perkembangan Program Sembako (KPM)



Sumber: Himbara, diolah



06.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan





Indikator kesejahteraan Aceh mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I dan triwulan II 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan pada Februari 2025 diikuti oleh angka kemiskinan yang turut mengalami penurunan pada Maret 2025. Namun demikian, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, kemiskinan di Aceh masih tertinggi, sementara TPT berada pada peringkat ketiga tertinggi.



6.1. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh mengalami perbaikan. Pada Februari 2025, tingkat TPT di Provinsi Aceh tercatat sebesar 5,50%, mengalami penurunan sebesar 0,06% poin dibandingkan Februari 2024 sebesar 5,56%. Sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2025, terjadi penambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 100 ribu orang. Penurunan TPT juga didorong oleh membaiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2025 yang tercatat sebesar 65,63%, meningkat dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 64,15%. Meningkatnya TPAK menunjukkan semakin meningkatnya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) untuk memproduksi barang dan jasa di Provinsi Aceh.

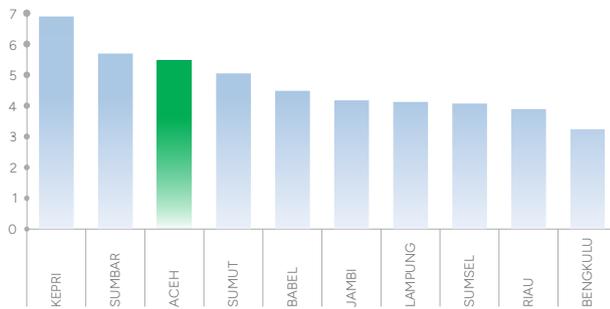
Tabel 6.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TINGKAT PENGANGGURAN %	
Februari 2024	5,56%
Februari 2025	5,50%

Sumber: BPS, diolah

Lapangan pekerjaan yang memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah Lapangan usaha (LU) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,95% poin) dan sektor Pengangkutan dan Pergudangan (0,79% poin).

Grafik. 6.1 Tingkat Pengangguran di Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Penurunan TPT di Aceh masih lebih lambat jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera. TPT di Provinsi Aceh menduduki peringkat ketiga tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Aceh didukung oleh berbagai faktor. Pada Triwulan I merupakan musim panen padi sehingga terdapat penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian. Disamping itu, meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa menjelang bulan Ramadhan berkontribusi pada terciptanya lapangan pekerjaan musiman. Selain itu, perbaikan kondisi ketenagakerjaan ini juga merupakan hasil dari berbagai upaya yang terintegrasi, seperti program pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Tabel 6.2. Perkembangan TPT

PENGANGGURAN	2024	2025
	FEB	FEB
Jumlah Angkatan Kerja (orang, dalam ribuan)		
Bekerja	2.455	2.556
Pengangguran	145	149
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
Persentase TPAK (%)	64,15	65,63
Tingkat Pengangguran Terbuka		
TPT (%)	5,56	5,50

Sumber: BPS, diolah

Tabel 6.3. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

SEKTOR	Februari 2025 (%)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	40,02
Perdagangan Besar & Eceran	14,23
Industri Pengolahan	7,55
Konstruksi	7,40
Jasa Pendidikan	6,05
Administrasi Pemerintahan	6,05
Akomodasi dan Makan Minum	5,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan	3,27

Sumber: BPS, diolah

LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar. Pangsa penyerapan tenaga kerja pada LU ini mencapai 40,02%. Selanjutnya diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran (14,23%), Pendidikan (7,55%), Industri Pengolahan (7,40%), Konstruksi (6,05%), Akomodasi dan Makan Minum (6,05%), Administrasi Pemerintahan (5,92%), dan Jasa Lainnya (3,27%).

Tenaga kerja di Provinsi Aceh saat ini didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2025, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 32,81%. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan SD ke bawah sebesar 25,37%, SMP sebesar 18,74%,

Tabel 6.4. Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

PENDIDIKAN TERTINGGI	2024	2025
	FEB	FEB
Sekolah Menengah Atas	34,40%	32,81%
Sekolah Dasar ke Bawah	26,10%	25,37%
Sekolah Menengah Pertama	19,09%	18,74%
Diploma IV, S1, S2, S3	13,49%	14,98%
Sekolah Menengah Kejuruan	3,55%	4,73%
Diploma I/II/III	3,37%	3,37%

Sumber: BPS, diolah

perguruan tinggi sebesar 14,98%, SMK sebesar 4,73%, dan diploma sebesar 3,37%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2024.

Status pekerja di Aceh masih didominasi oleh Buruh/Karyawan/Pegawai. Berdasarkan data Februari 2025, status pekerjaan penduduk Provinsi Aceh didominasi oleh Buruh/Karyawan/Pegawai yaitu sebesar 30,73%. Sementara itu, porsi terkecil adalah pekerja berstatus Bebas Non Pertanian sebanyak 4,38%.

Sementara jika dilihat berdasarkan status pekerjaan utama, tenaga kerja informal mengalami peningkatan. Pada Februari 2025, penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 35,69%, sedangkan kegiatan informal sebanyak 64,31%. Dibandingkan Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan 1,12% poin. Di sisi lain, penduduk dengan pekerjaan informal mengalami peningkatan sebesar 1,12%. Hal ini patut menjadi perhatian karena pekerja informal cenderung berpendapatan tidak tetap sehingga memiliki kerentanan lebih tinggi.

Tabel 6.5. Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan

STATUS PEKERJAAN	FEB 2024	FEB 2025
	PORSI (%)	PORSI (%)
Buruh/Karyawan/Pegawai	31,80%	30,73%
Berusaha Sendiri	23,86%	21,57%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	15,65%	16,08%
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	15,07%	14,22%
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	5,01%	8,06%
Pekerja Bebas di Pertanian	4,60%	4,96%
Pekerja Bebas di Non Pertanian	4,00%	4,38%

Sumber: BPS, diolah

Nilai Tukar Petani⁴ (NTP) Provinsi Aceh pada triwulan II 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2025, NTP tercatat sebesar 123,20, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 120,96. NTP di atas 100 menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap hasil produksi produksi lebih tinggi dibandingkan pengeluaran petani. Pada bulan Juni 2025, peningkatan NTP terjadi di subsektor Tanaman Pangan (NTTP) sebesar 1,70%, Perikanan (NTPN) sebesar 1% dan Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 0,39%. Sedangkan, penurunan NTP terjadi di subsektor Hortikultura (NTPH) sebesar 4,39% dan Peternakan (NTPT) sebesar 0,20%.

Tabel 6.6. Nilai Tukar Petani

NILAI TUKAR PETANI (NTP)	
Triwulan I 2025	120,96
Triwulan II 2025	123,20 ▼

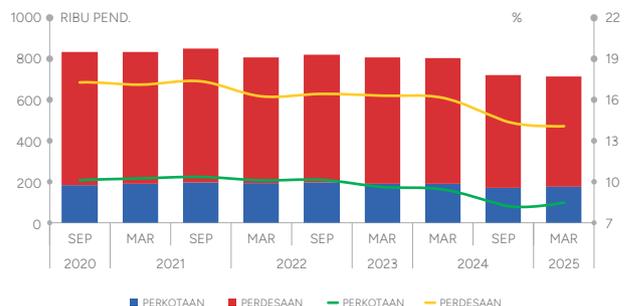
Sumber: BPS, diolah

6.2. Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Provinsi Aceh terus mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan data terkini, persentase kemiskinan di Provinsi Aceh pada Maret 2025 tercatat sebesar 12,33%, menurun 0,31% poin dibandingkan September 2024 sebesar 12,64%. Penurunan angka kemiskinan di Aceh dipengaruhi oleh beberapa indikator yang cenderung membaik yaitu pertumbuhan ekonomi, terjaganya inflasi, dan berlanjutnya program bantuan sosial.

Penurunan persentase penduduk miskin didorong oleh penurunan kemiskinan di perdesaan. Jika dibandingkan antara periode September 2024 dengan Maret 2025, persentase penduduk miskin di perdesaan menurun dari 14,99% menjadi 14,44%. Di sisi lain dengan perbandingan periode yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan meningkat dari 8,37% menjadi 8,54%. Namun, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh mengalami penurunan. Pada posisi Maret 2025 jumlah penduduk miskin tercatat 704,69 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan posisi September 2024 sebesar 718,96 ribu jiwa. Jika dilihat lebih rinci, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan meningkat sebesar 3,14% dari sebelumnya 168,71 ribu jiwa pada September 2024 menjadi 174,18 ribu jiwa pada Maret 2025. Pada periode yang sama, terjadi penurunan penduduk miskin di perdesaan sebesar 3,72% dari sebelumnya 550,25 ribu jiwa pada September 2024 menjadi 530,51 ribu jiwa pada Maret 2025.

Grafik 6.2. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota



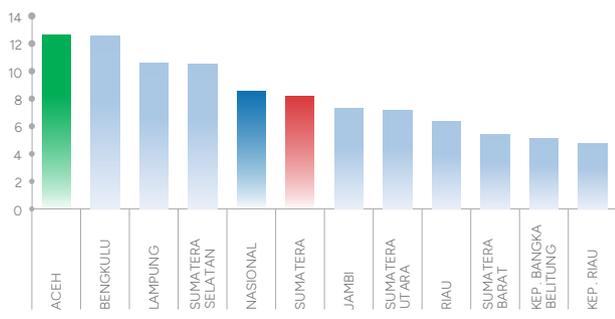
Sumber: BPS, diolah

*September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan

Data tingkat kemiskinan pada Maret 2025 menunjukkan Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Angka kemiskinan Aceh yang sebesar 12,33%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera yang sebesar 8,85% serta Nasional 8,47%.

4. Rasio antara indeks harga diterima dan harga dibayar petani

Grafik 6.3. Penduduk Miskin di Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Penurunan persentase kemiskinan juga turut memengaruhi sebaran garis kemiskinan di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil survei BPS di Provinsi Aceh, garis kemiskinan pada Maret 2025 dibandingkan dengan September 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,56%, sehingga pendapatan per kapita perbulan yang semula Rp665.855,- menjadi Rp676.247,- per kapita per bulan. Kontribusi komponen makanan masih memberikan andil terbesar terhadap nilai garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan di Maret 2025 yakni sebesar Rp515.075,- per kapita per bulan sementara komponen bukan makanan sebesar Rp161.172,- per kapita per bulan.

Komoditas makanan masih menjadi komponen terbesar pembentuk garis kemiskinan. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa komponen terbesar pembentuk Garis Kemiskinan adalah komoditas makanan dengan sumbangan sebesar 75,15% di perkotaan dan 76,84% di perdesaan. Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/ cakalang, dan telur ayam. Sementara peranan komoditas bukan makanan berkontribusi sebesar 24,85% di perkotaan dan 23,16% di perdesaan dengan komoditas yang menyumbang besar terhadap garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

Tabel 6.7. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan

KEMISKINAN	
KEMISKINAN (%)	
MARET 2024	14,23
SEPTEMBER 2024	12,64 ▼
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)	
MARET 2025	1,951
SEPTEMBER 2024	1,836 ▼
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)	
MARET 2025	0,470
SEPTEMBER 2024	0,420 ▼

Sumber: Data BPS, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2025 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. P1 mengalami penurunan dari 1,951 pada September 2024 menjadi 1,836 pada Maret 2025. Begitu pula dengan P2 yang mengalami penurunan setelah sebelumnya 0,470 pada September 2024 menjadi 0,420 pada Maret 2025. Turunnya nilai Indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung membaik, semakin mendekati garis kemiskinan. Begitu juga dengan kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung semakin menyempit.

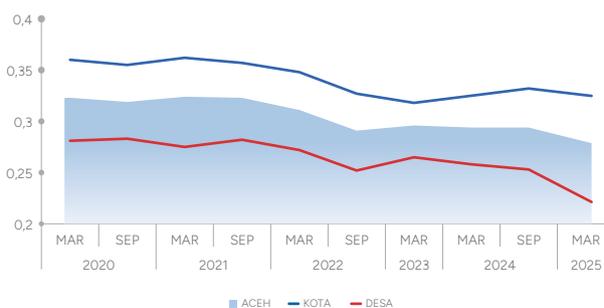
Tabel 6.8. Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)

DAERAH	SEPTEMBER 2024		MARET 2025	
	P1	P2	P1	P2
Perkotaan	0,945	0,275	1,187	0,258
Perdesaan	2,503	0,633	2,197	0,510
Gabungan	1,951	0,470	1,836	0,420

Sumber: Data BPS, diolah

Ketimpangan di perkotaan dan perdesaan mengalami perbaikan. Dalam pengukuran ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, digunakan indikator Rasio Gini⁵. Berdasarkan daerah, Rasio Gini pada perkotaan pada Maret 2025 sebesar 0,329, sedangkan pada perdesaan sebesar 0,224. Terjadi penurunan rasio baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan pada periode Maret 2025 dibandingkan September 2024. Rasio Gini di Provinsi Aceh secara keseluruhan menunjukkan tren yang menurun di 0,282 pada Maret 2025, dibandingkan dengan September 2024 di 0,294. Sedangkan jika dibandingkan secara year-on-year pada Maret 2024, terjadi penurunan dari 0,294 menjadi 0,282 di Maret 2025.

Grafik 6.4. Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah



Sumber: BPS, diolah

*September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan

5. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi



07.

Prospek Perekonomian Daerah





Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2025 secara keseluruhan diprakirakan tetap kuat berada di kisaran 4,41%-4,81% (yoy), berpotensi melambat dibandingkan angka pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,66% (yoy). Tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh ditopang oleh masih positifnya pertumbuhan investasi dan ekspor luar negeri, dan terjaganya konsumsi rumah tangga. Secara keseluruhan tahun 2025, laju inflasi Provinsi Aceh diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam range sasaran inflasi nasional sebesar $2,5\pm 1\%$ (yoy) yang di dukung pelaksanaan strategi pengendalian inflasi melalui 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).



7.1. Prospek Makroekonomi

Di sisi global, kinerja pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 masih diperkirakan melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2024. Berdasarkan *“World Economic Outlook – Global Economy: Tenuous Resilience amid Persistent Uncertainty”* oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada bulan Juli 2025, perekonomian global tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,0% (yoy) atau naik sebesar 0,2% (yoy) dari angka proyeksi awal pada April 2025 sebesar 2,8% (yoy) pada *“World Economic Outlook: A Critical Juncture amid Policy Shifts”* Edisi April 2025. (Tabel 7.1). Secara umum, terdapat revisi atas proyeksi pertumbuhan untuk hampir seluruh negara oleh IMF. Revisi atas ini mempertimbangkan dampak positif kebijakan *front-loading* untuk menghindari perang dagang, tarif resiprokal efektif AS yang lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, serta perbaikan kondisi finansial global seiring dengan melemahnya Dollar AS dan perluasan kebijakan fiskal di beberapa negara.

Tabel 7.1 Angka Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia di Tahun 2025 (%yoy)

Wilayah	JAN 2025	APR 2025	JUL 2025
World Output	3,3	2,8	3
Advance Economies	1,9	1,4	1,6
United States	2,7	1,8	2
Euro Area	1,0	0,8	1,2
Japan	1,1	0,6	0,5
United Kingdom	1,6	1,1	1,4
Emerging Market	4,2	3,7	4
China	4,6	4,0	4,2
India	6,5	6,2	6,4

Sumber: International Monetary Fund (IMF)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Amerika Serikat di tahun 2025 meningkat dari proyeksi sebelumnya pada bulan April 2025 sebesar 1,8% (yoy) menjadi 2,0% (yoy) pada Juli 2025. Revisi atas angka proyeksi ini turut dipengaruhi oleh aktivitas *front-loading* yang dilakukan oleh importir, maupun konsumen AS untuk menghindari tarif resiprokal yang implementasinya telah ditunda dari bulan April menjadi pada bulan Agustus 2025. Selain dari itu, peningkatan aktivitas pada sektor keuangan di AS pasca diumumkan penundaan tarif resiprokal juga turut mendorong revisi atas proyeksi pertumbuhan ekonomi AS.

Revisi atas angka proyeksi juga terjadi pada negara-negara maju lainnya seperti negara anggota Uni Eropa dan Inggris. Pada proyeksi pertumbuhan ekonomi negara anggota Eurozone, terdapat revisi atas dari 0,8% (yoy) pada proyeksi April 2025 menjadi 1,2% (yoy) pada proyeksi Juli 2025, atau naik sebesar 0,4% (yoy). Revisi atas angka proyeksi pada negara anggota *Eurozone* tersebut turut dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB pada triwulan II yang sesuai dengan

ekspektasi pasar yaitu sebesar 0,1% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,6% (yoy). Selain dari itu peningkatan aktivitas *front-loading* ekspor ke AS oleh perusahaan farmasi di Eropa juga turut meningkatkan angka proyeksi. Pertumbuhan tersebut turut dipengaruhi oleh tingkat investasi yang tinggi, ditengah pelemahan daya beli konsumen Eropa. Sementara itu, revisi atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris turut dipengaruhi oleh realisasi pertumbuhan PDRB triwulan II sebesar 0,3% (yoy), lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar 0,1% (yoy). Peningkatan PDB Inggris turut dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja sektor jasa yang tumbuh sebesar 0,4% (yoy).

Laju pertumbuhan negara berkembang seperti Cina dan India juga mengalami revisi atas dari proyeksi sebelumnya oleh IMF. Laju pertumbuhan ekonomi Cina pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 4,2% (yoy) atau lebih tinggi sebesar 0,2% (yoy), dari 4,0% (yoy) pada proyeksi April 2025. Revisi atas proyeksi pertumbuhan Cina ini turut didorong oleh peningkatan ekspor ke negara lain sebagai akibat penurunan permintaan dari AS, serta didorong oleh pelemahan nilai tukar Renminbi. Di sisi lain, laju pertumbuhan India pada tahun 2025 diperkirakan berada pada angka 6,4% (yoy) atau lebih tinggi sebesar 0,2% (yoy) dari proyeksi April 2025 sebesar 6,2% (yoy), lebih baik dibandingkan revisi proyeksi Cina dan negara-negara maju. Tetap tingginya proyeksi pertumbuhan India, turut didukung oleh prospek menguatnya konsumsi rumah tangga, dan meningkatnya upah riil di atas angka inflasi.

Pada proyeksi inflasi dunia 2025, tidak terdapat banyak perubahan dan angka Inflasi diperkirakan akan terus menurun hingga 2026. Rata-rata inflasi tahunan global pada tahun 2025 diperkirakan berada pada angka 4,2% (yoy) atau lebih rendah sebesar 0,1% (yoy) dari angka proyeksi April 2025. Angka inflasi tersebut akan berlanjut turun ke angka 3,6% (yoy) di tahun 2026, on-track dengan proyeksi April 2025. Kendati demikian, terdapat banyak potensi peningkatan risiko inflasi yang disebabkan oleh perang dagang dan perkembangan geopolitik global. Sebagai contoh, potensi keberlanjutan dan peningkatan tarif resiprokal oleh AS, penguatan Dollar AS, potensi penurunan suku bunga yang lebih rendah oleh *The Fed* dan Bank Sentral lainnya untuk mengantisipasi peningkatan inflasi, serta konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan Ukraina.

Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan tetap tumbuh kuat.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang baik. Inflasi nasional pada tahun 2025 juga diproyeksikan akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy). Angka tersebut dapat dicapai dengan dukungan konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Walaupun demikian,

secara umum terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia di tahun 2025, baik dari sisi global maupun sisi domestik.

Dari sisi tantangan global, perekonomian Indonesia diperkirakan akan masih menghadapi dampak dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Kendati telah disetujuinya perjanjian perdagangan antara AS dan Indonesia, dengan tarif resiprokal disetujui pada angka 19%, tarif ini masih berpotensi akan berdampak pada turunnya volume dan nilai beberapa komoditas ekspor Indonesia melalui second round effect, yaitu menurunnya jumlah ekspor negara produsen barang industri seperti Cina dan Jepang ke AS yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya ekspor bahan baku dan komoditas Indonesia ke negara tersebut.

Dari sisi tantangan domestik, perekonomian Indonesia diperkirakan akan dihadapi tantangan seperti tren pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke informal. Selain dari itu dampak berkelanjutan dari kebijakan realokasi anggaran juga diperkirakan berdampak pada sektor konstruksi dan sektor penyedia jasa akomodasi, makanan dan minuman.

Perekonomian Aceh pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 4,41% - 4,81% (yoy). Dari sisi permintaan, tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi Aceh ditopang oleh masih positifnya pertumbuhan ekspor luar negeri dan terjaganya konsumsi rumah tangga. Komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2025 diperkirakan akan tetap tumbuh kuat. Hal ini turut didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi sesuai pada target nasional sebesar $2,5\pm 1\%$ (yoy).

Pertumbuhan konsumsi pemerintah secara keseluruhan pada 2025 diperkirakan akan berkontraksi di tengah kebijakan realokasi anggaran. Hal ini seiring dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi Asta Cita. Selain dari itu, berkontraksinya tingkat konsumsi pemerintah di tahun 2025 juga dapat dikaitkan dengan base effect tingginya konsumsi pemerintah pada tahun 2024, di mana terdapat beberapa kegiatan besar seperti Pemilu, PON, dan Pilkada yang turut mendorong angka realisasi belanja pemerintah. Selain dari itu, kebijakan efisiensi anggaran juga turut mempengaruhi tingkat konsumsi pemerintah.

Pertumbuhan PMTB/investasi pada tahun 2025 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Hal ini dikarenakan oleh selesainya seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Aceh pada akhir tahun 2024, dan belum adanya pembangunan PSN baru di tahun 2025. Kendati demikian, normalisasi angka pertumbuhan PMTB pasca selesainya PSN diperkirakan akan terjadi di tahun 2025. Kendati demikian terdapat beberapa potensi proyek yang akan dimulai pada tahun 2025 berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025 perihal Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2025-2029. Selain dari itu, normalisasi angka pertumbuhan ini juga turut didorong oleh aktivitas konstruksi di Provinsi Aceh seperti pada sektor perumahan, konstruksi jalan, dan infrastruktur penunjang.

Kinerja ekspor luar negeri secara keseluruhan tahun 2025 diperkirakan akan tetap tinggi. Kinerja ekspor luar negeri diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kinerja tahun 2024. Peningkatan kinerja ekspor diperkirakan seiring dengan tingginya ekspor batubara yang didorong oleh permintaan dari India, di tengah tingginya potensi perang dagang. Pertumbuhan angka ekspor diperkirakan masih tetap didorong dan didominasi oleh komoditas batubara dan kopi. Berdasarkan proyeksi harga komoditas dunia yang dirilis oleh IMF pada bulan April 2025, harga batubara diperkirakan mengalami penurunan sebesar 15,8% (yoy) pada tahun 2025. Harga kopi arabika setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2024, diperkirakan akan termoderasi di tahun 2025 dan 2026 dengan penurunan harga sebesar -8,3% (yoy) dan -4,0% (yoy). Moderasi harga juga diperkirakan akan terjadi pada komoditas minyak sawit (CPO), yang diproyeksikan turun pada tahun 2025 dan 2026 sebesar -7,0% (yoy).

Sementara itu, dari sisi penawaran pertumbuhan ekonomi akan turut didorong oleh peningkatan kinerja beberapa Lapangan Usaha (LU) strategis seperti LU Pertanian, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Transportasi dan Pergudangan.

Secara umum, peningkatan kinerja LU Pertanian diperkirakan akan didorong oleh kebijakan pemerintah dalam mendorong ketahanan pangan. Kebijakan seperti penetapan harga Gabah Kering Panen (GKP), Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perluasan lahan panen diperkirakan akan turut mendorong angka pertumbuhan LU Pertanian.

Sementara itu, kinerja LU Perdagangan, dan LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan akan membaik, seiring dengan peningkatan permintaan akan barang konsumsi dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Hal ini turut didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi.

7.2. Prospek Inflasi

Berdasarkan prakiraan dari *The International Monetary Fund* (IMF), rata-rata angka inflasi global diperkirakan berada pada angka 4,2% (yoy) pada tahun 2025 dan berlanjut ke angka 3,6% (yoy) di tahun 2026. Angka tersebut masih berada di atas level pra-pandemi dengan kisaran 3,5% (yoy) pada tahun 2017-2019. Kendati demikian, masih terdapat risiko tekanan inflasi yang diakibatkan oleh perkembangan geopolitik global, seperti perang dagang akibat dari kebijakan tarif resiprokal AS dan menguatnya Dollar AS. Sementara itu, inflasi nasional diperkirakan akan kembali ke dalam rentang target inflasi $2,5\pm 1\%$ (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2025, laju inflasi Provinsi Aceh diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam range sasaran inflasi nasional sebesar $2,5\pm 1\%$ (yoy). Dari sisi penawaran, program pembukaan lahan pertanian oleh pemerintah pusat diperkirakan mampu mendorong produksi pangan domestik.

Hal ini didukung oleh prakiraan cuaca yang lebih baik dan selesainya pembangunan Bendungan Rukoh dan Bendungan Keureuto yang diharapkan mampu meredam potensi bencana banjir di sentra produksi pangan. Selain itu, melalui Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/kPTS/SR.310/M.11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2025 diharapkan mampu mendorong penyerapan pupuk subsidi sehingga dapat meningkatkan produktivitas produksi komoditas pertanian. Ketiga hal tersebut diperkirakan dapat menjaga stabilitas inflasi khususnya inflasi *Volatile Food* pada tahun 2025.

Di sisi lain, kebijakan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) rokok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 96 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan No 97 Tahun 2024 diperkirakan dapat mendorong inflasi. Selain itu, Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 diperkirakan juga berpengaruh terhadap gejolak inflasi *Administered Price* khususnya komoditas bahan bakar pada tahun 2025. Walaupun demikian, prakiraan harga minyak dunia yang lebih rendah yang didorong oleh kebijakan ekspansif Amerika Serikat dalam produksi energi fosil diperkirakan mampu menahan gejolak harga komoditas bahan bakar pada tahun 2025. Selanjutnya, terdapat pula risiko kenaikan inflasi akibat berakhirnya kebijakan diskon tarif air minum PAM pada Agustus 2025.

Inflasi Provinsi Aceh pada 2025 diperkirakan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2024. Walaupun demikian, berbagai program yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh seperti GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) terus dilakukan untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan terkendali. Selanjutnya, strategi pengendalian inflasi melalui 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) terus digalakkan dalam rangka mengendalikan inflasi agar tetap berada pada sasaran $2,5\% \pm 1\%$.

7.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ekonomi Aceh yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi

1. **Mendorong peningkatan investasi dari luar Aceh, melalui penyederhanaan proses perizinan, kepastian keberlanjutan investasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai.** Peningkatan investasi khususnya dalam bentuk *direct investment* dari luar Aceh, baik domestik maupun internasional, diharapkan mampu memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh dalam jangka panjang melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru. *Direct Investment* merupakan investasi dalam bentuk riil yang dapat berupa pabrik,

fasilitas distribusi, toko, maupun kantor cabang baru. Upaya peningkatan investasi dapat ditempuh melalui promosi Aceh sebagai destinasi investasi yang aman, dengan iklim investasi yang kondusif, serta didukung dengan kemudahan proses mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi. Selain itu, keberhasilan peningkatan investasi juga patut didukung melalui kepastian hukum terhadap keberlangsungan investasi, serta dengan dukungan infrastruktur pendukung yang memadai seperti akses jalan, listrik, dan air bersih.

2. **Mendorong dan menjaga kesehatan pembiayaan syariah masyarakat, khususnya pembiayaan modal UMKM.** Sebagai daerah yang masih didominasi oleh sektor primer dan sektor jasa, pelaku UMKM memiliki peran yang signifikan dalam menggerakkan pertumbuhan perekonomian Aceh. Mengingat pentingnya peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian Aceh, maka meningkatkan dan menjaga pembiayaan syariah untuk pelaku UMKM akan memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi Aceh.
3. **Memperkuat peran Satgas percepatan investasi atau Regional Investment Relations Unit (RIRU) Aceh.** Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diperlukan keterlibatan investasi swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam hal ini, peran Satgas percepatan investasi menjadi penting dan perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi proyek *clean and clear*, mengikuti event promosi investasi, memetakan calon investor potensial, serta memperkuat peran media dalam memperkenalkan proyek-proyek investasi kepada calon investor potensial.
4. **Diversifikasi sumber pertumbuhan dengan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor potensial.** Sebagai provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, perekonomian Aceh masih didominasi oleh aktivitas ekonomi yang bergantung pada SDA dan bersifat ekstraktif, tingkat produksi yang fluktuatif dan bernilai tambah rendah, LU Pertanian dan LU Pertambangan secara total berkontribusi terhadap 39,27% dari total PDRB Aceh. Penciptaan sumber pertumbuhan baru akan mengurangi ketergantungan ekonomi Aceh terhadap kedua sektor fluktuatif tersebut. Penciptaan sumber pertumbuhan baru dapat dilakukan melalui sektor-sektor potensial Aceh yang memiliki *multiplier effect* yang besar seperti sektor pariwisata dan industri pengolahan.
5. **Mendorong pengembangan dan implementasi green economy dan hilirisasi sektor pertanian dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh.** *Green Economy* adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, atau juga dapat diartikan sebagai aktivitas perekonomian yang sedikit atau tidak menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Adapun pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau mencakup penerapan *Good Agricultural Practices*,

sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan, serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai nilai, dukungan kemitraan dan permodalan, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan di Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilam, pala, dan karet. Selain dari itu, hilirisasi sektor pertanian juga turut didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan resiliensi petani supaya tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas primer. Hilirisasi sektor pertanian juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru akibat penambahan proses pengolahan komoditas primer menjadi barang sekunder.

6. **Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMI di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan dan mendorong peningkatan nilai tambah UMKM.** Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program Pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mendorong perbankan untuk lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM yang potensial dengan memperbesar porsi pembiayaan di tahun 2025. Penyaluran KUR dan UMI tentunya harus turut diiringi dengan pengembangan kapabilitas UMKM yang terlibat, khususnya pada literasi keuangan dan pembukuan. Dalam hal ini, digitalisasi sistem pembayaran menggunakan QRIS dan Mesin POS (Point-of-Sales) juga akan mempermudah pelaku usaha dalam proses pembukuan dan pencatatan keuangan usaha. UMKM dengan pencatatan dan pembukuan keuangan yang baik tentunya akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan untuk memperluas skala usahanya.
7. **Mengakselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.** Sebagai daerah yang memiliki kekhususan menerapkan syariat islam dalam seluruh aspek, termasuk ekonomi, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Aceh cukup besar. Namun, potensi yang besar tersebut dinilai belum dioptimalkan dengan baik. Diperlukan perhatian khusus serta kolaborasi antar pemangku kebijakan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, dan ekonomi pesantren.
8. **Memperkuat peran Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di setiap daerah** untuk mendukung ekosistem keuangan digital di Aceh. Transaksi non tunai/digital diharapkan dapat menjaga demand masyarakat, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar. Transaksi non tunai/digital juga diperkirakan akan terus meningkat pasca pandemi sebagai penopang pemulihan ekonomi daerah. Di lingkungan Pemerintah Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) juga perlu diakselerasi melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, Perbankan, serta pihak terkait lainnya.

Inflasi

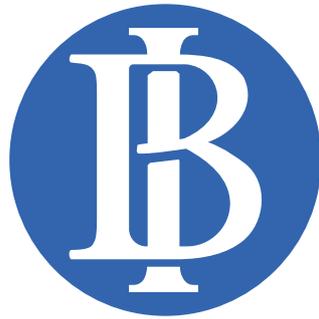
Pada tahun 2025, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu dilakukan langkah antisipatif yang bersifat struktural maupun seasonal untuk mengendalikan inflasi agar berada pada sasaran yang ditetapkan $2,5\% \pm 1\%$. TPID Provinsi Aceh secara konsisten melakukan berbagai program pengendalian inflasi yang mengacu pada strategi 4K, antara lain:

1. **Ketersediaan Pasokan** antara lain melalui aktivitas peningkatan produksi di daerah sentra dengan optimalisasi Good Agriculture Practices, replikasi *best practice*, dan hilirisasi pangan, penerapan *urban farming* dan pemanfaatan inovasi teknologi budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, pemberian bantuan sarana prasarana di sisi hulu untuk mendukung peningkatan produksi dan menjaga pasokan, serta mengakselerasi program KAD untuk komoditas pangan strategis antara daerah sentra dan non sentra.
2. **Keterjangkauan Harga melalui stabilisasi harga pangan strategis yaitu**, dengan melanjutkan program sinergi operasi pasar/pasar murah yang dilaksanakan di lokasi dan *timing* yang tepat. Di samping itu, melaksanakan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk komoditas pangan yang bergejolak (*volatile food*).
3. **Kelancaran Distribusi melalui peningkatan konektivitas antar daerah.** Peningkatan konektivitas antar daerah untuk mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan diantaranya dilakukan melalui pemanfaatan tol laut, fasilitasi kerjasama UMKM pangan dengan *e-commerce*, dan optimalisasi pemanfaatan *cold storage* untuk komoditas perikanan.
4. **Komunikasi Efektif melalui peningkatan akses informasi serta transparansi terkait harga antar daerah, peningkatan kapasitas dan koordinasi TPID Provinsi dan Kab/Kota, serta penguatan pengendalian ekspektasi inflasi.** Peningkatan akses informasi serta transparansi terkait harga antar daerah yakni, dengan pemanfaatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) sebagai referensi dalam rekomendasi kebijakan, Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan koordinasi dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kab/Kota, pelaksanaan *High Level Meeting* TPID, dan pelaksanaan *Capacity Building* TPID. Terakhir, pengendalian ekspektasi inflasi dilakukan dengan bersinergi dengan media dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat.
5. **Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh** secara garis besar terdiri dari program jangka pendek (*quick wins*) dan program jangka panjang (*long term*). Program *quick wins* berupa kerjasama antar daerah (KAD) dan operasi pasar/pasar murah. Sementara itu, program *long-term* diarahkan untuk ketahanan pangan dalam

bentuk pengembangan klaster pangan. Selain itu, terdapat program komunikasi dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) seperti belanja bijak berbelanja maupun himbauan pemanfaatan sumber pangan alternatif dalam rangka diversifikasi pangan.

6. **Mendorong penguatan ketahanan pangan Aceh.**

Penguatan ketahanan pangan ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan kelompok tani agar produktivitas kelompok meningkat dan memiliki daya tawar yang kuat dalam menentukan harga jual komoditas pangan. Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui optimalisasi peran BUMDes/Koperasi maupun unit usaha milik daerah lainnya sebagai lembaga *buffer* yang dapat menyerap *over supply* produksi pangan maupun menyerap komoditas pangan dari daerah (kab/kota ataupun provinsi) ketika terjadi kelangkaan pada produksi domestik. Upaya memperkuat kualitas data pangan untuk mendukung Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang lebih optimal dan optimalisasi pembuatan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pemetaan rantai pasokan pangan mulai dari produsen hingga pedagang. Terakhir, penguatan pangan dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi pangan melalui pembiayaan sektor pangan yang mendukung ketahanan pangan.



Daftar Istilah

Administered price

Salah satu disgregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/ kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

APBA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Faktor Fundamental

Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau *output gap*, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.

Faktor Non Fundamental

Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (*volatile foods*), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (*administered price*).

Indeks Ekspektasi Konsumen

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Inflasi inti

Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan

Migas

Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.

MTM

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Omzet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Perceived risk

Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara

QTQ

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Sektor ekonomi dominan

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Volatile food

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.

YOY

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



Tim Penyusun

Penanggung Jawab
Agus Chusaini

Koordinator Penyusun
Hendy Hadiyan

Tim Penulis
Hafidz Yudhansyah
Imam Wahyudi
Muhammad Raziq Ilmi
Kristina Panduwinata
Hana Nabillah
Irfan Bagus Rachmanto
Hafidz Bramandito



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI ACEH**

Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia
Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116
<https://www.bi.go.id>

